

SKRIPSI

**PENGEMBANGAN KAPASITAS BIROKRASI LEVEL BAWAH
DALAM KEBIJAKAN SWASEMBADA JAGUNG DI KABUPATEN
TAKALAR**

(Studi Kasus Implementasi Kebijakan Swasembada Jagung)

Disusun dan diusulkan oleh

NURWAHYUDIN

Nomor Stambuk : 105610500914



**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2019**

**PENGEMBANGAN KAPASITAS BIROKRASI LEVEL BAWAH DALAM
UPAYA SWASEMBADA JAGUNG DI KABUPATEN TAKALAR
(Studi Kasus Implementasi Kebijakan Swasembada Jagung)**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Ilmu Administrasi Negara

Disusun dan Diajukan Oleh :

NURWAHYUDIN

Nomor Stambuk : 105610500914



PRODI ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2019

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Pengembangan Kapasitas Birokrasi Level Bawah Dalam Kebijakan Swasembada Jagung Dikabupaten Takalar (Studi Kasus Implementasi Kebijakan Swasembada Jagung)

Nama Mahasiswa : Nurwahyudin
Nomor Stambuk : 105610500914
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyetujui :

Pembimbing I

Dr. H. Muhsinndiyah, M.M

Pembimbing II

Dr. Nuryanti Mustari, S.IP, M.Si

Mengetahui :

Dekan
Fakultas UIN Sunan Gunung Djati
Makassar

Dr. Hj. Ikhani Malik, S.Sos, M.Si

Ketua Jurusan
Ilmu Administrasi Negara

Nasrulhaq, S.Sos, MPA


PENERIMAAN TIM


Telah diterima oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. Berdasarkan Surat Keputusan / Undangan Menguji Ujian Skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor : 0029/FSP/A.4-II/V/10/2019 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) dalam program studi Ilmu Administrasi Negara di Universitas Muhammadiyah Makassar pada hari Senin Tanggal 27 Bulan 05 Tahun 2019.

TIM PENILAI

Ketua

Sekretaris


Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si


Dr. Burhanuddin, S.Sos., M. Si

Penguji

1. Dr. H. Muhammadiyah, MM (Ketua)  (.....)
2. Hj. Andi Nurani Aksa, SH, MH  (.....)
3. Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si  (.....)
4. Haerana, S.Sos. M. Pd  (.....)

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Nurwahyudin
Nomor Stambuk : 105610500914
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa Skripsi ini dengan judul: "Pengembangan Kapasitas Birokrasi Level Bawah Dalam Kebijakan Swasembada Jagung Di Kabupaten Takalar (Studi Kasus Implementasi Kebijakan Swasembada Jagung)" adalah sepenuhnya merupakan karya sendiri. Tidak ada bagian di dalamnya yang merupakan hasil plagiat dari karya orang lain, tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dalam masyarakat keilmuan.

Atas pernyataan ini, saya akan menanggung resiko/sanksi yang ditujukan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya ini, atau ada klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya ini.

Makassar, Mei 2019

Yang Menyatakan,


Nurwahyudin

ABSTRAK

NURWAHYUDIN. Pengembangan Kapasitas Birokrasi Level Bawah Dalam Kebijakan Swasembada Jagung Di Kabupaten Takalar (Muhammadiyah, dan Nuryanti Mustari)

Pengembangan kapasitas birokrasi level bawah merupakan hal yang sangat mempengaruhi tercapainya tujuan dari program swasembada jagung, Tujuan penelitian untuk mengetahui Efisiensi, Efektifitas dan responsivitas kinerja birokrasi dalam pengembangan kapasitas birokrasi level bawah dalam swasembada jagung di kabupaten Takalar.

Jenis Penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan memilih orang tertentu yang dianggap memiliki pengetahuan tentang penelitian tersebut. Jumlah informan dalam penelitian ini adalah 10 orang. Pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan kapasitas birokrasi level bawah dalam kebijakan swasembada jagung di Kabupaten Takalar belum berjalan secara maksimal yang dimana proses pengembangan birokrasi level bawah terlihat jelas kurang terhadap pemahaman yang terkandung didalam program tersebut, dari segi efisiensi itu belum maksimal pelaksanaannya dalam program ini, begitu juga dengan efektifitas program ini belum terlihat maksimal itu terlihat dari hasil produksi yang jagungnya tetapi responsivitas kinerja pemerintah dalam pengembangan kapasitas birokrasi level bawah dalam swasembada jagung di kabupaten Takalar sudah berjalan dengan baik

Kata Kunci: pengembangan kapasitas birokrasi, kebijakan swasembada jagung

KATA PENGANTAR



“Dengan Menyebut Nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang”

Assalamu ‘Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pengembangan Kapasitas Birokrasi Level Bawah Dalam Kebijakan Swasembada Jagung Di Kabupaten Takalar (Studi Kasus Implementasi Kebijakan Swasembada Jagung)”**.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang penulis ajukan sebagai syarat untuk mendapatkan gelas sarjana di Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Ucapan terima kasih pertama-tama penulis persembahkan untuk kedua orang tua penulis, ayahanda tercinta **Muhlis** dan Ibunda tercinta **Hasnah** Atas dukungan, semangat serta doa-nya yang tidak pernah berhentinya diberikan kepada penulis agar selalu diberikan kemudahan dan kelancaran untuk setiap segala urusannya. Terima Kasih atas segala perjuangan dan pengorbanannya, semoga ayahanda dan ibunda senantiasa di rahmati oleh Allah SWT. Kepada saudaraku yang selalu mengantar penulis bimbingan dan memberikan semangat dalam segala bentuk tingkah laku yang tidak bisa tertebak untuk mengalihkan rasa lelah dalam proses penyusunan skripsi ini, adik **Nuriman** Terima kasih atas semua bentuk penyemangatnya yang tidak bisa tertebak.

Banyaknya rintangan dan tantangan yang harus penulis hadapi dalam penyelesaian skripsi ini dan menyadari bahwa hal ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak yang selalu mengarahkan penulis untuk mencapai dan memperoleh kebenaran untuk menyelesaikan skripsi ini. Izinkan penulis untuk memberikan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuannya kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini, maka dari itu penulis juga mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak **Dr. H. Abd Rahman Rahim, S.E., M.M** selaku rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Ayahanda **Dr. H. Muhammadiyah, M.M** selaku pembimbing I dan Ibunda **Dr. Nuryanti Mustari, S.IP., M.Si** selaku pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
3. Ibunda **Dr. Hj. Ihyani Malik, M.Si** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Kakanda **Nasrul Haq, S.Sos., M.PA** selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara dan Kakanda **Nurbiah Tahir, S.Sos, M.Ap** selaku sekretaris jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Segenap Dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah sudi berbagi ilmunya kepada penulis selama ini.

6. Para pihak Dinas/Instansi yang ada pada lingkup Dinas Pertanian Kabupaten Takalar yang telah memberi izin kepada penulis untuk melakukan penelitian..
7. Buat kakandaku yang selalu membimbing saya, memberikan semangat untuk saya dan senantiasa memberikan bantuan baik itu secara materil ataupun secara moril, terima kasih kakanda **Muh Ridwan Tate, Syahrul Minwar, Kahfi, Fajar dan Sahar**
8. Buat Saudaraku **Agus Arifin, Rizky Nurbani Anto alias Cambang, Fahmi, Hendrik, Arif Beta, Arun Nursyafaat**, yang senantiasa memberikan bantuan yang tiada ternilai baik moral maupun materi kepada penulis, Senantiasa menemani penulis dalam perjuangannya di Makassar,
9. Kepada Saudaraku yang ada di **GEMAR Dan KAMRI** yang telah menjadi keluarga ke dua saya dan selama ini telah memberikan dorongan semangat dan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini,
10. Kepada Kakanda, adinda dan teman-teman pengurus **BEM Fisip dan Pikom IMM Fisip** yang telah memberikan ruang kepada penulis untuk berproses di dalamnya.
11. Seluruh teman-teman kelas **AND014E** yang selama ini selalu bersama-sama mengikuti jadwal kuliah yang selalu punya cerita dan pengalamannya tersendiri didalam kelas.
12. Kepada seluruh keluarga besar **SOSPOL Universitas Muhammadiyah Makassar** terutama kepada satu angkatan penulis **AFILIASI 2014** yang selalu memberikan semangat dan dorongan dalam penyelesaian skripsi ini.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi penelitian ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, Mei 2019

Penulis,

Nurwahyudin



DAFTAR ISI

Halaman Pengajuan Skripsi	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah	iii
Abstrak	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	x
Daftar Tabel	xii
Daftar Gambar	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Perbandingan penelitian terdahulu	12
B. Pengembangan kapasitas (capacity building)	13
C. Street level bureaucracy (birokrasi level bawah)	25
D. Swasembada Jagung	31
E. Kerangka Fikir	36
F. Fokus Penelitian	37
G. Definisi Focus Penelitian	38
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Waktu dan lokasi penelitian	
B. Jenis dan Type Penelitian	35
C. Sumber Data	35
D. Informan peneltian	36
E. Teknis Pengumpulan Data	36
F. Tehnik Analisis Data	37
G. Pengabsahan Data	37
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Deskripsi Obyek Penelitian	45
1. Gambaran umum Kabupaten Takalar	45
2. Gambaran dinas pertanian	46

B. Pengembangan Kapasitas Birokrasi Level Bawah Pada Kebijakan Swasembada Jagung Di Kabupaten Takalar (Studi Kasus Implementasi Kebijakan Swasembada Jagung)	52
1. Efisiensi	52
2. Efektifitas	59
3. Responsivitas kinerja pemerintah	66

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	74
B. Saran	76

DAFTAR PUSTAKA	77
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN	80
-----------------------	-----------

BIODATA	84
----------------------	-----------



DAFTAR TABEL

A. Tabel 2.1 Luas Panen Jagung	35
B. Table 3.1 Tabel Informan Penelitian	41



DAFTAR GAMBAR

A. Gambar 2.1 Tingkatan Birokrasi	31
B. Gambar 2.2 Kerangka Fikir	37



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah dalam usaha peningkatan kinerja maka dilakukan melalui pengembangan kapasitas, pengembangan kapasitas telah menjadi langkah utama yang dilakukan oleh birokrasi dalam peningkatan kinerja dan keterampilan para aparatur, pengembangan kapasitas yang dilakukan oleh birokrasi mengacu kepada proses optimalisasi keterampilan para stakeholders baik itu keterampilan para individu maupun dari dukungan kelembagaan dari satu atau lebih organisasi, pengembangan kapasitas birokrasi yang dilakukan oleh pemerintah merupakan sebuah proses yang bertujuan untuk memfasilitasi para stakeholders untuk berevolusi dan beradaptasi dengan persyaratan kontekstual dan memenuhi peran para birokrat dalam sistem pemerintahan, pengembangan kapasitas ini sangat diharapkan mampu memberikan dampak terhadap peningkatan kinerja dan kualitas kinerja para stakeholders mengingat tuntutan masyarakat terhadap peningkatan kualitas pelayanan pemerintah (Kiki Angraini 2015 :1093)

Pengembangan kapasitas merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan karena di dalam pengembangan kapasitas terjadi proses untuk melakukan sesuatu atau serangkaian gerakan perubahan multi level di dalam individu baik itu dalam segi kelompok-kelompok, organisasi-organisasi dan sistem-sistem dalam rangka untuk memperkuat kemampuan penyesuaian individu dan organisasi sehingga dapat tanggap terhadap perubahan lingkungan yang ada. Dengan kata lain bahwa pengembangan kapasitas adalah sebuah proses dimana

individu, kelompok, organisasi, institusi, dan masyarakat meningkatkan kemampuan mereka untuk menghasilkan kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (*core functions*), memecahkan permasalahan, mewujudkan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dan memenuhi kebutuhan pembangunan dalam konteks yang lebih luas dengan cara yang berkelanjutan. (Milen, 2006)

Dalam usaha peningkatan kinerja, pemerintah telah melakukan usaha melalui pengembangan kapasitas birokrasi khususnya birokrasi level bawah karena Birokrasi level bawah adalah aparat birokrasi yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dalam memberikan pelayanan dengan kata lain bahwa birokrasi level bawah adalah mereka yang menjalankan tugas dan berhubungan langsung dengan masyarakat, praktek birokrasi level bawah tersebut merupakan mekanisme untuk mengatasi situasi sulit, yaitu sebagai upaya untuk keluar dari situasi frustratif antara besarnya permintaan pelayanan dan keterbatasan sumber daya yang dimiliki, apalagi dalam kenyataannya permintaan peningkatan pelayanan publik tidak pernah berhenti. Sehingga peran birokrasi level bawah sangatlah penting di dalam tata kelola pemerintahan (Nindicha, 2012)

Pengembangan kapasitas birokrasi level bawah adalah hal yang sangat penting dilakukan dalam menjaga kinerja birokrasi dalam tata kelola pemerintah daerah karena birokrasi level bawah adalah barisan terdepan yang memberikan pelayanan langsung terhadap masyarakat, sehingga seluruh permasalahan yang terjadi dilapangan mereka yang mengetahuinya dan mengetahui bagaimana cara penyelesaiannya, birokrasi ditingkat level bawah perlu untuk merespon apa saja yang menjadi faktor akuntabilitas birokrasi adalah suatu ukuran yang

menunjukkan tingkat kesesuaian penyelenggara pelayanan dengan ukuran pada sebuah nilai dan norma eksternal di masyarakat atau para stakeholders (Rulinawaty Kasmad dan Alwi 2014)

Pengembangan kapasitas adalah serangkaian strategi yang dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan Efisiensi, Efektifitas, dan Responsivitas kinerja pemerintah yang diharapkan mampu mendorong kinerja baik secara individu maupun organisasi, tujuan pengembangan kapasitas yang ingin dicapai yakni efisiensi dalam hal waktu (*time*) dan sumber daya (*resource*) yang dibutuhkan guna mencapai mencapai *outcomes*, sementara itu efektifitas berupa sebuah kepatasan usaha yang harus dilakukan demi tercapainya hasil yang diinginkan dan responsivitas merujuk kepada bagaimana mensinkronkan antara kebutuhan yang diperlukan dengan kemampuan untuk pemenuhan kebutuhan tersebut (Imam Hardjanto, 2006)

Pencapaian tujuan dari pengembangan kapasitas adalah upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas dan responsivitas kinerja birokrasi demi peningkatan kemampuan SDM maka Birokrasi level bawah dituntut agar mampu menjalankan perannya, stakeholders diharapkan mampu bekerja dengan lebih baik secara kemampuan, keterampilan dan pengetahuan untuk itu dirasa perlu dilakukan pengembangan kapasitas, dan ini hal yang sangat urgen mengingat pelaksanaan tugasnya di lapangan, sehingga dengan adanya pengembangan kapasitas birokrasi khususnya birokrasi level bawah maka diharapkan mampu meningkatkan kemampuan dan keterampilannya jika kompetensi para aparatur meningkat dengan adanya pengembangan kapasitas

tersebut maka bukan hal yang mustahil untuk dilakukan ketika birokrasi focus kepada penyelenggaraan pelayanan (Peter Hupe 2007).

Dalam pengembangan kapasitas birokrasi level bawah ada beberapa hambatan yang terjadi dan masalah yang paling utama adalah resistensi dari staf bahwa pengembangan kapasitas merupakan sebuah inovasi dan perubahan sehingga mereka harus melakukan usaha-usaha inovatif dan ada sebagian staf yang kurang dinamis yang tidak positif menyambut perubahan, sehingga berdampak negatif terhadap pengembangan kapasitas tersebut. Pengembangan kapasitas menimbulkan pekerjaan dan beban yang harus di tanggung oleh semua elemen yang ada dalam sebuah organisasi. (Milen, 2006).

Tuntutan masyarakat terhadap penyedia komoditas pangan sangatlah besar, namun hambatan yang terjadi di masyarakat Indonesia adalah karena masih seringnya terjadi kelangkaan beras. Dalam rangka menunjang peningkatan produksi pangan, sehingga meningkatkan ketahanan pangan baik dalam ketersediaan, stabilitas, aksesibilitas, konsumsi sehingga dapat dilihat kemajuan pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya swasembada pangan pemerintah pemerintah daerah harus mampu menyediakan daya ruang atau fasilitas yang dibutuhkan oleh petani jagung, sehingga produktivitas pangan maksimal dan regulasi pemerintah berpihak kepada swasembada pangan, menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang ketahanan pangan dan gizi (kementrian agraria dan tata ruang/badan pertanahan nasional 2018).

Dalam upaya mencapai keberhasilan ketahanan pangan dan gizi TP Nomor 17 tahun 2015, pemerintah telah menentukan sasaran produksi dan

produktifitas untuk masing-masing komoditi, khususnya padi, jagung dan kedelai. Pemerintah melalui peraturan kementerian pertanian republik indonesia Nomor 03/Permentan/OT.140/2/2015 tentang pedoman upaya khusus (UPSUS) peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai (PAJALE) melalui program perbaikan jaringan irigasi dan sarana pendukungnya. Organisasi penyelenggaraan UPSUS PAJALE sesuai permentan Nomor 03/2015 ada disemua tingkatan, baik ditingkat pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan dan desa (Kementerian Hukum Dan HAM. 2014).

Program UPSUS PAJALE diharapkan Swasembada pangan di Sulawesi-Selatan dapat mencapai target yang diinginkan yaitu memenuhi kebutuhan dasar manusia, sehingga pemenuhannya menjadi salah satu hak asasi yang harus dipenuhi secara bersama-sama dalam pencapaian swasembada pangan. Namun Kenyataan yang terjadi fakta dilapangan bahwa ada kenaikan harga beras terjadi pada saat musim tanam. Kenaikan harga beras tidak melampaui dari 10 persen dari batas harga normal yang ditetapkan oleh pemerintah, hal inilah yang menjadi salah satu faktor yang menghambat pemerintah dalam pencapaian target swasembada pangan disulawesi-selatan (Gervin Nathaniel 2017)

Sulawesi Selatan dalam sentra produksi yakni kabupaten sidrap, Pinrang dan kota pare-pare dengan jumlah ketersediaan pangannya mencapai 62 bulan. Stok daerah sentra produksi, umumnya digunakan sebagai persediaan beras “*Move in National*” (MOVENAS) untuk membantu daerah lainnya yang kekurangan pangan, termasuk daerah yang terkena bencana alam (Gervin Nathaniel.2017).

Untuk membantu daerah yang kekurangan pangan maka Padi, jagung dan kedelai sangat ditekan oleh pemerintah untuk menjadi tiga komoditas utama melalui berbagai program pendukung yang dilakukan oleh pemerintah, salah satu swasembada yang ingin dicapai dalam waktu dekat ini adalah swasembada jagung melalui peningkatan produktifitas dari berbagai daerah salah satunya adalah takalar, namun dalam pencapaian swasembada jagung di takalar produksi jagung masih kurang stabil. Maka dari itu pemerintah kabupaten takalar mengupayakan stabilnya produksi jagung ditakalar untuk mewujudkan swasembada jagung di Kabupaten Takalar. untuk meningkatkan produksi jagung dikabupaten takalar, untuk mengatasi masalah ketidak stabilan produksi tersebut maka stakeholders yang menangani swasembada jagung perlu melakukan pengembangan kapasitas birokrasi, sangat dibutuhkan pengembangan swasembada jagung dengan meningkatkan kelembagaan dan kegiatan kelompok tani serta gapoktan dalam swasembada jagung yang melibatkan petani atau kelompok tani dan penyediaan sistem usaha tani (bibit, peptisida dan pupuk) sehingga terjadinya swasemba jagung yang meningkatkan produktivitas jagung di Kabupaten Takalar.(*Yusdi Albar.2015*)

Dalam mewujudkan tercapainya swasembada jagung di Takalar pemerintah harus mampu memanfaatkan wilayah yang mayoritas pertanian dan mempunyai potensi untuk pengembangan jagung. Hal ini juga didukung oleh sumberdaya alam, sumberdaya petani, dan potensi Kabupaten Takalar sebagai penyangga kota metropolitan (potensi pasar produk pertanian), ketersediaan lahan pertanian ditakalar sangatlah mendukung dalam mewujudkan swasembada jagung

ditambah dengan ketersediaan air yang cukup yang merupakan salah satu kebutuhan utama dalam melakukan pertanian hal inilah yang kelebihan kab.takalar dalam mencapai swasembada jagung (Aji Saputro.2015).

Peran pemerintah dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat sangatlah penting terutama pada birokrasi level bawah, namun birokrasi level bawah yang menjadi garda terdepan dalam memberikan pelayanan tidak memberikan pelayanan yang maksimal karena lemahnya mental publik dengan merebaknya praktek kolusi dan nepotisme hal itu terjadi karena kurangnya profesionalisme dari para birokrat itu terlihat dari terjadinya tarik ulur kepentingan sehingga ini membuat lambatnya pelayanan yang diberikan dan lamanya waktu pengurusan hal ini yang membuat distribusi bantuan untuk para petani terlambat, hal lain yang terjadi kurangnya kemampuan birokrasi merespon krisis yang terjadi pada masyarakat dan kurangnya kemampuan untuk mengendalikan krisis tersebut sehingga apa yang menjadi keluhan dari masyarakat itu terbaikan (Kurniawan.2008)

Dalam hal pencapaian swasembada pangan pemerintah telah menetapkan visi sebagai sasaran dalam mewujudkan kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani, visi ini diharapkan mampu untuk dicapai untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional , dalam upayanya untuk kedaulatan pangan maka pemerintah berusaha untuk menjaga ketahanan pangan dan gizi, dengan tujuan untuk terwujudnya swasembada padi,jagung dan kedelai (Sukma Fadil Pratama. 2017)

Untuk mewujudkan visi swasembada jagung pemerintah harus berusaha untuk mencapai target produksi dan mengendalikan inpor sebagai salah satu

upaya dalam pencapaian swasembada jagung, namun ada beberapa lain yang dilakukan oleh pemerintah yaitu pengembangan jagung seluas 3,0 juta hektar untuk lokasi tanam jagung, menanam jagung dilahan tidur bersama gerakan pemuda tani, menanam jagung integrasi sawit, kubun maupun perhutanan (Sukma Fadil Pratama. 2017)

Seluruh stakeholders yang bekerja untuk mewujudkan swasembada pangan mengharapkan ditunjangnya sarana dan prasarana pendukung dalam melaksanakan tugas terkhusus bagi para pendamping disetiap kecamatan, karena target pada tahun 2045 mampu menjadi lumbung pangan dunia, terkhusus untuk jagung pemerintah menargetkan swasembada jagung bisa terwujud pada tahun 2017, target produksi yang ingin dicapai oleh kabupaten takalar 25 juta ton pipilan kering dimana jika produksi ini tercapai maka indonesia tidak perlu lagi mengimpor jagung (Arthur Gideon.2017)

Dalam hal mencapai tujuan diperlukan suatu bentuk perencanaan dan tindakan nyata untuk dapat dilakukan atau mewujudkannya, secara umum visi dan misi adalah suatu konsep untuk sebuah proses perencanaan yang disertai dengan tindakan yang benar sesuai dengan apa yang direncanakan dan diharapkan untuk mencapai suatu tujuan, jadi visi dan misi adalah hal yang penting didalam suatu organisasi karena tanpa adanya ini visi dan misi sebuah organisasi tidak akan mampu untuk bisa mencapai tujuan yang diinginkan. Pentingnya visi merupakan pandangan tentang sebuah ukuran tujuan jangka panjang suatu organisasi atau rencana yang hendak akan dicapai oleh suatu organisasi. Sedangkan misi suatu

kegiatan yang mengarahkan organisasi pada tujuan yang diharapkan untuk menjadi impian organisasi tersebut. (Adilah Shadrina.2013)

Visi dan misi berhubungan dengan Manajemen yang dibutuhkan dalam suatu organisasi untuk mencapai suatu organisasi dan tujuan individu yang ada dalam organisasi tersebut. Semua bentuk organisasi apapun itu dimana orang-orang bekerja bersama dalam hal untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. manajemen diperlukan organisasi agar semua upaya usaha pencapaian tujuan menjadi lebih muda. (Sholah.2014)

Sehubungan dengan Manajemen, harapan kinerja sangat penting di dalam suatu organisasi dalam birokrasi level bawah. Kinerja yang baik akan memudahkan semua jenis organisasi mencapai visi, misi dan tujuannya. Faktor sumber daya untuk segi manusia ini merupakan elemen yang sangat perlu dan penting diperhatikan oleh organisasi, karena setiap sumber daya manusia dengan harapan kinerja yang baik diperlukan dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan kegiatan organisasi. Tanpa adanya sumber daya sebuah manusia dengan kinerja yang baik juga maka akan sulit bagi semua jenis organisasi untuk mencapai tujuan yang sebelumnya telah ditetapkan. (Denny Bagus.2010).

Terkait dengan harapan kinerja, otonomi kepegawaian adalah hal yang penting dalam suatu organisasi karena segala aktivitas yang mampu atau bisa berkenaan dengan pemberdayaan sumber daya untuk para pegawai dalam suatu kerjasama untuk melakukan sebuah pencapaian tujuan tertentu. Dengan adanya otonomi kepegawaian maka pemberdayaan birokrasi level bawah secara efektif dan efisien dapat terwujud dan mampu menghasilkan birokrasi level bawah dalam

kualitas dan kuantitas yang dapat dipertanggungjawabkan..(Erlanda Juliansyah Putra.2017)

Berdasarkan latar belakang yang ada, maka menarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENGEMBANGAN KAPASITAS BIROKRASI LEVEL BAWAH DALAM KEBIJAKAN SWASEMBADA JAGUNG DI KABUPATEN TAKALAR (Studi Kasus Implementasi Kebijakan Swasembada Jagung).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Efisiensi pengembangan kapasitas birokrasi level bawah dalam swasembada jagung di kabupaten Takalar ?
2. Bagaimana Efektivitas pengembangan kapasitas birokrasi level bawah dalam swasembada jagung di kabupaten Takalar ?
3. Bagaimana Responsivitas kinerja birokrasi level bawah dalam swasembada jagung di kabupaten Takalar ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Efisiensi pengembangan kapasitas birokrasi level bawah dalam swasembada jagung di kabupaten Takalar
2. Untuk mengetahui Efektivitas pengembangan kapasitas birokrasi level bawah dalam swasembada jagung di kabupaten Takalar

3. Untuk mengetahui Responsivitas kinerja birokrasi level bawah dalam swasembada jagung di kabupaten Takalar

D. Manfaat penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang diharapkan dari penelitian ini adalah bahwa penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan rujukan bagi pengembangan penelitian selanjutnya yang terkait dengan pengembangan kapasitas berkenaan dengan swasembada jagung.

2. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan sebagai bahan pengembangan kapasitas birokrasi level bawah di Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi-Selatan.
- b. Bagi petani jagung hasil penelitian ini diharapkan mampu memberi tambahan wawasan pengetahuan atau masukan-masukan agar dapat menentukan langkah-langkah dalam swasembada jagung

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perbandingan Peneliti Terdahulu

Berdasarkan perbandingan terdahulu yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Maka perbedaan peneliti ini yaitu, penulis berfokus pada Pengembangan Kapasitas Birokrasi Level Bawah Dalam Kebijakan Swasembada Jagung di Kabupaten Takalar (Studi Kasus Implementasi Kebijakan Swasembada Jagung) dengan menggunakan tujuan dalam Pengembangan Kapasitas yaitu Efisiensi, Efektifitas dan Responsivitas kinerja pemerintah.

Adapun beberapa hasil penelitian yang membuktikan tentang pengembangan kapasitas birokrasi level bawah adalah sebagai berikut :

1. Kiki Angraini, Lelly Indah Mindarti, Romy Hermawan (2015) Pengembangan Kapasitas Pegawai Untuk mewujudkan Good Governance dalam (Studi pada kantor Badan kepegawaian Daerah Kabupaten Malang).
Untuk mengetahui pengembangan kapasitas melalui peningkatan pengetahuan dan ketrampilan pegawai BKD kabupaten Malang dan penerapan dari Good Governance
2. Ashar Prawitno, Rakhmat, Muhammad Rusdi (2015) Pengembangan Kapasitas Organisasi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik pada dinas kehutanan dan perkebunan kabupaten Bone Untuk mengetahui pengembangan organisasi dalam melakukan peningkatan kualitas pelayanan publik pada kantor Dinas Kehutanan dan perkebunan kabupaten Bone yang berfokus pada tiga aspek

yaitu pada pengembangan sumber daya fisik baik pengembangan proses operasional dan pengembangan sumber daya manusia

3. Setyo Nugroho (2014) pengembangan kapasitas aparatur pemerintah desa dalam upaya mewujudkan good governance (studi pada balai besar pemberdayaan masyarakat dan desa di malang) Untuk mengetahui peningkatan kualitas kinerja para aparatur desa dalam rangka mewujudkan good governance pada balai besar untuk pemberdayaan masyarakat dan desa pdi desa malang
4. Dina Nurwira Endarsari, Ida Hayu Dwimawanti, Dewi Rostyaningsih (2013) Analisis pengembangan kapasitas (*capacity building*) pegawai pada badan kepegawaian daerah kabupaten kendal Untuk mengetahui dan menganalisis pengembangan kapasitas atau (*capacity building*) pegawai badan kepegawaian daerah untuk kabupaten kendal dan untuk engetahui faktor penghambat dan pendukung dari pengembangan kapasitas badan kepegawaian daerah.
5. Rino Arnold (2016) Pengembangan kapasitas kelembagaan dalam peningkatan prrstasi program kreatifitas mahasiswa (PKM) Universitas lampung Untuk mengetahui pengembangan kapasitas kelembagaan bagian kemahasiswaan dalam peningkatan prestasi program kreativitas mahasiswa (PKM)

B. Pengembangan Kapasitas

Morgan dalam Milen (Kiki Angraini: 2015) mendefinisikan kapasitas sebagai kemampuan ketrampilan, pemahaman, sikap, nilai-nilai hubungan, motivasi, sumberdaya, ataupun kondisi-kondisi yang memungkinkan setiap

individu, organisasi, jaringan kerja atau juga sektor, dan sistem yang lebih jauh luas karena untuk melaksanakan fungsi-fungsi yang untuk mereka dan mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan sudah dari waktu ke waktu (Kiki Angraini: 2015). Selanjutnya, UNDP dan Canadian Internasional Development Agency (CIDA) memberikan pengertian pengembangan kapasitas sebagai proses dimana individu, kelompok, organisasi, institusi, dan masyarakat harus mampu meningkatkan kemampuan mereka untuk menghasilkan kinerja dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi atau disebut (*core functions*), memecahkan permasalahan, merumuskan dan mewujudkan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, dan memahami dan memenuhi kebutuhan pembangunan dalam konteks yang lebih luas dalam cara yang berkelanjutan, sehingga UNDP (United Nations Development Programs) memfokuskan dalam hal ini pada tiga dimensi, yakni : (1) pada tenaga kerja (*human resources*) menyangkut pada hal kualitas SDM dan cara SDM untuk dimanfaatkan; (2) modal atau dimensi fisik, menyangkut sarana material, peralatan, bahan-bahan yang diperlukan dan tuang/gedung; dan (3) teknologi, menyangkut organisasi dan gaya manajemen, fungsi perencanaan, penentuan kebijakan, pengendalian dan evaluasi, komunikasi serta sisten informasi manajemen (Yosep Ginting: 2012).

Valentie Udoh Jamesse (Setyo Nugroho: 2014) berpendapat bahwa pengembangan kapasitas adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan rakyat untuk negara yang sedang berkembang untuk meningkatkan kemampuan keterampilan manajemen maupun untuk kebijakan yang esensial yang sangat

dibutuhkan untuk membangun struktur budaya sosial politik, ekonomi dan pengembangan SDM sehingga mereka mampu bersaing dalam persaingan pada era global saat ini. Kemudian, Brown (Setyo Nugroho: 2014) juga berpendapat bahwa pengembangan kapasitas sebagai suatu proses yang mampu meningkatkan kemampuan dan keterampilan seseorang, suatu organisasi atau sebuah sistem untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Sementara itu Morrison (Setyo Nugroho: 2014) melihat bahwa pengembangan kapasitas merupakan suatu proses untuk melakukan sesuatu, atau serangkaian gerakan, perubahan multilevel pada level individu, kelompok-kelompok, organisasi-organisasi ataupun sebuah sistem dalam hal itu untuk memperkuat penyesuaian antara individu dan organisasi (Setyo Nugroho: 2014).

Defenisi tentang pengembangan kapasitas (*capacity building*) memiliki berbagai variasi antara satu ahli dengan ahli lainnya. Hal ini terjadi karena pengembangan kapasitas merupakan sebuah kajian yang secara multi dimensi, dapat dilihat dari berbagai sudut pandang sisi, sehingga pendefinisian tentang *capacity building* ini juga sangat bervariasi tergantung dari seorang ahli, secara umum konsep *capacity building* dapat artikan untuk sebagai proses membangun kapasitas individu, kelompok atau organisasi. *Capacity building* juga dapat diartikan sebagai salah satu upaya memperkuat kapasitas individu, kelompok ataupun itu organisasi yang dicerminkan melalui pengembangan kemampuan, keterampilan, potensi dan bakat dan berserta penguasaan kompetensi-kompetensi sehingga individu maupun itu kelompok atau organisasi juga untuk dapat bertahan dan mampu mengatasi sebuah tantangan

perubahan yang terjadi secara tepat dan tidak terduga. *Capacity building* juga dapat pula untuk dimaknai sebagai proses kreatif dalam rangka untuk membangun kapasitas yang belum nampak. Sementara itu, Milen (Jenivia Dwi Ratnasari: 2012) berpendapat bahwa pengembangan kapasitas tentunya adalah hal merupakan proses peningkatan terus menerus (berkelanjutan) dari individu, organisasi atau instansi, tidak hanya terjadi satu kali. Ini merupakan suatu proses internal yang cuma hanya bisa di fungsikan dan mampu untuk dipercepat dengan bantuan dari luar (Jenivia Dwi Ratnasari: 2013).

Pengembangan kapasitas birokrasi yang merupakan sebuah proses yang dilakukan untuk mengembangkan keterampilan yang lebih memfokuskan kepada pengembangan individu, kelompok, organisasi maupun sebuah sistem, pengembangan kapasitas menurut Milen (Jenivia Dwi Ratnasari: 2013) merupakan pengembangan kapasitas baik secara tradisional dan penguatan organisasi memfokuskan hanya pada sumber daya pengembangan hampir dilakukan seluruhnya mengenai permasalahan sumber daya manusia, maupun itu proses dan struktur organisasi. Pendekatan modern menguji semua lini dimensi kapasitas di semua tingkatan dalam (misi strategi, kebudayaan, gaya manajemen, struktur, sumberdaya manusia, keuangan, asset informasi, infastruktur) termasuk interaksi dalam sistem yang lebih luas terutama dengan kesatuan lain yang ada, pemegang saham dan para pelanggan. Ada banyak pendapat dalam merumuskan pengembangan kapasitas bahwa pengembangan kapasitas selalu menyangkut penguatan didalam suatu organisasi yaitu strategi,

kebudayaan, gaya manajemen, struktur, sumberdaya manusia, keuangan, atau aset informasi dan infrastruktur (Jenivia Dwi Ratnasari: 2013).

Perhatian pada pengembangan kapasitas (*capacity building*) menekankan pada beberapa aspek yang dianggap sangat mempengaruhi proses pengembangan kapasitas yaitu: (1) pengembangan SDM; training, rekrutmen dan maupun itu pemutusan pegawai profesional, manajerial dan teknis; (2) keorganisasian, yaitu pengaturan struktur, proses, sumberdaya dan gaya manajemen; (3) jaringan kerja (*network*), berupa koordinasi, katifitas organisasi, fungsi *network*, serta interaksi formal dan informal; (4) lingkungan organisasi, yaitu baik dalam aturan (*rule*) dan undang-undang (*legislation*) sebagai hal yang mengatur pelayanan publik. Tanggung jawab dan kekuasaan bagi semua antara lembaga, kebijakan yang menjadikan hambatan bagi seluruh *development tasks*, serta dukungan keuangan dan anggaran; dan (5) lingkungan kegiatan yang bisa lebih luas lainnya, meliputi faktor politik, ataupun ekonomi dan situasi kondisi yang memengaruhi kinerja (Yosep Ginting: 2012)

Kapasitas dipandang bisa dari dua dimensi, yaitu kapasitas penilain dan pengembangan kapasitas (Yosep Ginting: 2012) kapasitas penilaian adalah hal yang dasar penting bagi perumusan bagi sebuah strategi yang koheren bagi pengembangan kapasitas, kapasitas penilaian merupakan sebuah bentuk proses dan analisis struktur, dimana berbagai dimensi dalam sebuah kapasitas dinilai dalam konteks sistem yang jauh lebih luas, sebagaimana suatu hal yang entitas atau individu tertentu didalam suatu sistem dievaluasi. Adapun pengembangan

kapaistas adalah suatu konsep untuk hal yang lebih luas dari human *resources development*, karena ditekankan pada sistem baik itu secara keseluruhan, lingkungan dan dimana konteks individu, organisasi dan masyarakat beroperasi dan berinteraksi.

Enemark (Yosep Ginting: 2012) mengemukakan bahwa dalam proses pengembangan kapasitas dapat difokuskan pada semua lini tingkatan manapun dan dilaksanakan berdasarkan tentang analisis yang mendalam terhadap seluruh dimensi yang relevan. Selain itu, pengembangan kapasitas selalu harus dilihat sebagai metodologi yang komprehensif ditunjukkan untuk memberikan sebuah hasil yang berkelanjutan melalui nilai dan mengatasi berbagai macam masalah yang relevan dan hubungan mereka.

Sementara itu, Merilee S. Grindle mendefinisikan Dalam proses pengembangan kapasitas yang dilakukan oleh pemerintah dalam pencapaian hasil yang berkelanjutan maka pemerintah mengembangkan suatu ragam strategi meningkatkan efisiensi, efektifitas dan responsivitas kinerja pemerintah, yakni efisiensi, baik dari segi dalam hal waktu (*time*) dan sumberdaya (*resources*) yang dibutuhkan sebagai guna mencapai suatu outcome; efektifitas berupa kepatutan usaha yang dilakukan demi hasil yang diinginkan; dan responsivitas, yakni bagaimana menyinkronkan antara kebutuhan dan kemampuan untuk maksud tersebut. Hal itu sejalan dengan dengan pendapat Mirelee S. Grindle bahwa pengembangan kapasitas secara lebih spesifik, pengembangan kapasitas bagi penyelenggara didefenisikan oleh Finn & Checksoway sebagai “sampai sejauh mana staf mampu menunjukkan

kontribusi yang nyata terhadap pengembangan personal, organisasi dan masyarakat (Yosep Ginting: 2012).

Pengembangan kapasitas yang dilakukan oleh pemerintah dalam peningkatan efektifitas, efisiensi dan responsivitas oleh para birokrat itu sering dilakukan dengan memberikan cara-cara (*tools*) terbaik untuk membantu pemerintah dalam menjalankan tanggung jawabnya. Hal ini termasuk membangun kemampuan pemerintah dalam penyusunan anggaran, mengumpulkan pendapatan, membuat dan melaksanakan undang-undang, mempromosikan keterlibatan masyarakat, membuat pengelolaan anggaran lebih transparan dan akuntabel, serta memerangi korupsi. Dalam konteks yang lebih sempit, pengembangan kapasitas birokrasi mencakup upaya-upaya untuk menyesuaikan, mereformasi, dan memodifikasi seluruh kebijakan, peraturan, prosedur, mekanisme kerja, koordinasi; meningkatkan keterampilan dan kualifikasi aparatur birokrasi; dan mengubah sistem nilai dan sikap yang dijadikan acuan aparatur birokrasi, agar birokrat mampu menyelenggarakan tata pemerintahan yang baik (Yosep Ginting: 2012).

Dalam pengembangan kapasitas birokrasi yang diharapkan mampu menjadikan pemerintah sebagai penyelenggara tata pemerintahan yang baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat itu harus memperhatikan salah satu hal dasar yang patut dimengerti dan disadari bersama dalam konteks pengembangan kapasitas adalah bahwa pengembangan kapasitas merupakan alat, tehnik, atau metode yang mampu untuk digunakan dalam peningkatan pelayanan publik yang diharapkan menuju pada perwujudan tata pemerintah

yang baik (*good governance*). Hal ini berarti bahwa pengembangan kapasitas harus dipahami sebagai sebuah fasilitas yang sangat memungkinkan untuk mewujudkan tujuan akhir penyelenggaraan pemerintah yaitu kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, maka yang menjadi program-program yang dicanangkan dalam program pengembangan kapasitas didasarkan pada pengabdian, baik itu juga pelayanan, dan demokratisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini sangat penting untuk dilakukan dalam pengembangan kapasitas karena bukan saja untuk menumbuhkan profesionalisme penyelenggara pemerintahan akan tetapi berorientasi juga pada dasar-dasar *good governance* (Kiki Anggraeni: 2015)

a. Tujuan pengembangan kapasitas

Rickett (Jenivia Dwi Ratnasari: 2013) menyebutkan "*the ultimate goal of the capacity building is to enable the is for organization to grow stronger in at achiving ats purpose and mision*" atau lebih jauh dirumuskan bahwa tujuan pengembangan kapasitas adalah :

- 1) Mengakselerasikan pelaksanaan desentraliasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 2) Pemantauan secara proporsional, baik itu dalam sebuah tugas, fungsi, sistem keuangan, mekanisme dan ataupun itu tanggung jawab dalam rangka melakukan pelaksanaan dalam hal peningkatan kapasitas.
- 3) Mobilisasi sumber-sumber dana pemerintah.
- 4) Penggunaan sumber-sumber dana secara efektif dan efisien.

b. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengembangan Kapasitas

Menurut Riyadi (Jenivia Dwi Ratnasari: 2013) ada lima hal pokok yang menjadi faktor-faktor yang signifikan mempengaruhi pengembangan kapasitas yaitu :

1) Komitmen bersama (*collective commitmens*)

Pengembangan kapasitas membutuhkan waktu yang lama dan juga itu memerlukan komitmen jangka panjang dan semua pihak juga ikut yang terlibat. Di dalam pengembangan kapasitas birokrasi *collective commitmens* merupakan modal dasar yang harus terus menerus ditumbuh kembangkan dan dipelihara secara baik. Komitmen ini bukan hanya untuk kalangan pemegang kekuasaan saja, namun meliputi seluruh bagian dari komponen yang ada dalam birokrasi tersebut. Pengaruh komitmen bersama sangat besar, karena faktor ini menjadi dasar dari seluruh rancangan kegiatan dan tujuan yang akan di capai bersama.

2) Kepemimpinan yang kondusif atau jga disebut (*condusiv leadership*)

Kepemimpina yang kondusif diartikan sebagai suatu proses kepemimpinan yang dinamis dalam hal membuka kesempatan yang luas ditujukan bagi setiap elemen organisasi dilakukn untuk menyelenggarakan pengembangan kapsitas. Dengan kepemimpinan yang kondusif seperti ini, maka akan terjadi alat pemicu untuk setiap elemen dalam dalam mengembangkan kapasitasnya.

3) Reformasi peraturan

Dalam proses sebuah organisasi harus disusun berbagai sebuah peraturan yang mendukung upaya pengembangan kapasitas dan dilaksanakan secara konsisten. Tentu saja adalah peraturan yang berhubungan langsung dengan kelancaran proses untuk pembangunan kapasitas itu sendiri, misalnya dengan itu saja peraturan adanya sistem *reward* dan *punishment*

4) Reformasi kelembagaan

Reformasi kelembagaan pada dasarnya atau intinya menunjuk kepada bagian secara struktural dan kultural. Maksudnya adalah adanya salah satu budaya kerja yang mendukung pengembangan kapasitas. Kedua aspek ini harus mampu dikelola sedemikian rupa dan menjadi sebuah objek aspek penting dan kondusif dalam rangka untuk menopang program pengembangan kapasitas. Misalnya saja menciptakan hubungan kerja yang lumayan baik antara karyawan dengan karyawan lainnya.

5) Peningkatan kekuatan maupun itu kelemahan yang dimiliki

Mengidentifikasi kekuatan maupun juga kelemahan agar dapat disusun program untuk menuju pengembangan kapasitas yang baik. Dengan adanya pengakuan dari personal dan lembaga tentang kelemahan dan kekuatan yang dimiliki dari kapasitas yang tersedia. Maka dari kelemahan yang dimiliki oleh suatu organisasi dapat cepat diperbaiki dan kekuatan yang dimiliki organisasi tetap dijaga dan dipelihara.

c. Hambatan Pengembangan Kapasitas

Yuwono menjelaskan dalam kiki anggraini (2015) menyebutkan hambatan *capacity building* ternyata ada lima di antaranya adalah :

- 1) Resistensi legal-prosedur, biasanya digunakan oleh pihak-pihak lain yang tidak mendukung program dalam proses pengembangan kapasitas dengan berbagai alasan
- 2) Resistensi dari pimpinan, khususnya supervisor ini jga sangat mendasarkan diri pada argumen bahwa dengan adanya pengembangan kapasitas, maka mau ataupun tidak mau kemampuan staf akan mamp meningkat dan bisa saja memicu kedudukan struktural mereka.
- 3) Resistensi dari staf, hambatan yang sangat paling utama adalah bahwa pengembangan kapasitas merupakan sebuah inovasi atas perubahan, sehingga mereka harus mampu melakukan perubahan atau usaha-usaha inovatif. Ada sebagian staf juga itu yang kurang dinamis dan tidak positif dalam menyambut perubahan, sehingga inilah bisa berdampak negatif terhadap program pengembangan kapasitas tersebut.
- 4) Resistensi konseptual, muncul karena program pengembangan kapasitas menimbulkan sebuah hal pekerjaan dan beban yang harus ditanggung oleh semua para elemen yang ada dalam organisasi tersebut. Mereka berpendapat bahwa jika dengan lebih efektif akan menambah bagi mereka beban kerja mereka, padahal beban kerja ini tentu berkorelasi positif dengan penambahan upah bagi para elemen.

5) Resistensi berupa mispersepsi yaitu mispersepsi bahwa pengembangan kapasitas akan bisa juga menimbulkan *self capacity building*, artinya kemampuan oleh setiap individu menjadi diabaikan tanpa melihat aspek-aspek lainnya, padahal koordinasi, kooperasi, kolaborasi, kerjasama dan berbagai elemen dalam organisasi tersebut sangat menentukan keberhasilan program pengembangan kapasitas dalam sebuah organisasi, ini bisa jadi hal ini merupakan persepsi yang dikatakan keliru yang sering terjadi dalam konteks keorganisasian.

d. Dimensi Dan Tingkatan Pengembangan Kapasitas

Dalam pengembangan kapasitas ada beberapa tingkatan yang perlu diperhatikan menurut GTZ (Deutsche Gesellschaft Fur Technische) dalam (Kiki, 2015) menggambarkan bahwa dalam proses pengembangan kapasitas terdapat menjadi tiga tingkatan yang menjadi focus analisis dan menjadi sebuah proses perubahan dalam suatu organisasi, meliputi :

- 1) Tingkatan sistem, suatu organisasi harus melakukan upaya proses perbaikan pada sistem, kebijakan, dan berbagai aturan yang menjadi dasar berbagai program, aktivitas, dan kegiatan pada organisasi. Dalam pengembangan kualitas sistem ini, yang menjadi focus utama yaitu perubahan pada kebijakan dan peraturan yang dianggap menghambat kinerja optimal organisasi.
- 2) Tingkatan organisasi, upaya pengembangan kapasitas (*capacity building*) berubungan dengan menciptakan perangkat struktur, kultur, dan pengelolaan organisasi yang mendukung para pegawai atau

individu untuk menunjukkan kinerja terbaiknya. Organisasi terdiri dari dua unsur utama, yaitu unsur perangkat keras (hardware) organisasi meliputi infrastruktur (gedung), struktur organisasi serta dukungan anggaran, dan unsur perangkat lunak (software) organisasi, prosedur kerja, dan sumberdaya informasi.

- 3) Tingkatan individu adalah merupakan individu sebagai sumberdaya manusia organisasi harus ditingkatkan kemampuan dan profesionalismenya, baik pengetahuan, kompetensi, keterampilan, maupun etika kinerja.

C. Birokrasi Level Bawah (*street level bureaucracy*)

Birokrasi level bawah merupakan aparat untuk sebuah birokrasi yang langsung bersentuhan dengan sebuah proses pelayanan publik atau dalam artian lain adalah untuk setiap aparat birokrasi yang melakukan akses itu secara langsung dengan publik atau melakukan pelayanan publik. Menurut Michael Lipsky (Nindicha: 2012) berpendapat bahwa *street level bureaucracy* adalah mereka yang ditugaskan untuk menjalankan tugas dan berhubungan langsung dengan masyarakat, Lipsky juga ikut mengatakan bahwa praktek birokrasi level bawah merupakan mekanisme dalam hal untuk mengatasi situasi yang sulit, yaitu menjadi sebagai upaya untuk keluar dari situasi frustatif antara besarnya permintaan untuk memberikan pelayanan dan keterbatasan sumber daya yang dimiliki. Apalagi dalam kenyataannya bahwa itu permintaan peningkatan pelayanan seperti tidak pernah berhenti,

birokrasi level bawah mempraktekkan pemberian diskersi atas dispensasi manfaat atau alokasi sanksi (Nindicha: 2012).

Street level birokrasi memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat yang merupakan tipe publik service yang dilakukan secara langsung artinya bahwa bagi setiap para birokrat ini yang memberikan suatu pelayanan secara langsung kepada para customernya (publik) yang memberikan pelayanan baik berdasarkan sesuai dengan permintaan publik dalam batasan sesuai juga aturan lembaga mereka masing-masing, cara dimana birokrat tingkat bawah memberikan manfaat dan struktur sanksi dan membatasi kehidupan masyarakat dan opputunities, ini mengarahkan juga sebuah cara untuk memberikan konteks sosial dimana street level birokrasi mendominasi kontroversi politik didalam kaidah pelayanan publik karena itu yang menjadi dua alasan umum. Pertama, berdebatan tentang ruang lingkup yang menjadi dua alasan umum. Pertama, berdebatan tentang ruang lingkup yang cukup tepat dan fokus untuk itu pelayanan pemerintah pada dasarnya perdebatan tentang persoalan untuk ruang lingkup dari karyawan publik. Kedua, street level birokrasi memiliki dampak yang lumayan cukup besar pada kehidupan masyarakat. Mereka menentukan kelayakan warga negara untuk dijadikan sebagai tunjangan pemerintah dan sanksi, street level birokrasi mengawasi pelayanan warga dalam menerima setiap program tersebut. Jadi, secara tersirat birokrasi level bawah memediasi aspek untuk setiap hubungan konstitusional warga negara (Nindicha, 2012).

Lipsky (2010) berpendapat bahwa street level birokrasi bukan hanya sekedar pemberian pelayanan kepada masyarakat dan tidak hanya juga

ditugaskan untuk menerapkan kebijakan publik, namun justru menjadikannya sebagai aktor utama dalam penentuan keberhasilan *good governance* dalam pemberian pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, peran birokrasi level bawah dikotomisasi, mereka harus mampu mengikuti setiap kebijakan yang diberlakukan karena mereka adalah para pelaksana kebijakan tersebut dan sangat mempengaruhi keberhasilan suatu kebijakan terutama dalam memberikan sebuah pelayanan, birokrasi level bawah yang merupakan birokrat yang berhubungan langsung dengan masyarakat harus mampu bersikap adil dalam memberikan sebuah pelayanan sesuai dengan permintaan orang yang dilayaninya dan street level birokrasi harus mampu mengembangkan mekanisme penanganan masalah untuk mengatasi permasalahan yang terjadi pada lingkungan kerja mereka (Michael Lipsky: 2010)

Street level birokrasi tidak pernah lepas dari sebuah kebijakan karena dalam pelaksanaannya dalam memberikan pelayanan itu selalu terikat oleh sebuah kebijakan. Itu berarti birokrasi level bawah tidak memiliki wewenang bebas dalam setiap aktifitasnya dalam lingkungan kerja, mereka dituntut untuk memberikan pelayanan yang sama terhadap kliennya sehingga mereka dituntut untuk meningkatkan pertanggung jawaban terhadap pekerjaan mereka, tanggung jawabnya terletak pada manajemen dan kemampuan mereka untuk menyalurkan tindakan para birokrat tingkat bawah terhadap hasil dari sebuah kebijakan yang diinginkan, Lipsky memberikan sebuah solusi untuk mempersempit lingkup peran pekerja garis depan dengan membatasi

kemampuan mereka untuk berinteraksi langsung dengan klien sehingga ini mampu mengurangi diskriminasi pelayanan (Michael Lipsky: 2010).

Street level birokrasi sebenarnya menjadi atau mewakili kebijakan dari instansi pemerintah tempat mereka bekerja, ini terjadi karena street level birokrasilah yang menjalankan kebijakan tersebut dan kebijakan itulah yang dilaksanakan dalam melayani masyarakat atas kasus-kasus mereka, street level birokrasi dapat membuat kebijakannya dengan cara tersebut karena mereka dapat melaksanakan kebijakan tersebut cara mereka akan menjalankan kebijakan itu artinya mereka mempunyai kekuasaan atas hak dalam menjalankan kebijakan tersebut, street level birokrasi seringkali berkonflik dengan kelompok yang memiliki perspektif yang berbeda dengan mereka didalam suatu organisasi misalnya manajer, mereka mungkin bisa menolak ekspektasi organisasi, misalnya melalui mogok kerja, ketidakhadiran yang berlebihan atau sikap apatis yang mempengaruhi bagaimana mereka melakukan pekerjaan mereka, kombinasi kebijakan dan tingkat kebebasan dari otoritas organisasi, dapat menyebabkan kebijakan dilakukan dengan cara yang tidak diinginkan atau tidak terduga, tindakan dan keputusan mereka mungkin tidak selalu sesuai dengan arahan kebijakan sehingga agensi mereka dapat melakukan tindakan yang bertentangan dengan kebijakan, niat dan tujuan mereka (Ermin Erasmus: 2017).

Street level birokrasi merupakan pelaksana dari kebijakan penguasa yang berarti bahwa birokrasi level bawah yang menjalankan apapun itu kebijakan yang dikeluarkan oleh penguasa dan bagi mereka dan mereka pula yang

mampu untuk menguatkan kebijakan yang dikeluarkan. Contohnya polisi adalah seseorang orang yang bertugas untuk menguatkan undang-undang ataupun berupa peraturan pusat maupun peraturan yang ada di daerah setempat. Di dalam kebijakan terhadap publik itu sendiri para street level birokrasi dibolehkan untuk membuat keputusan ad hoc dan perubahan dasar. Jika terjadi kerancuan atas kebijakan itu maka street level birokrasi ini diperbolehkan untuk menerjemahkan kebijakan itu sendiri (Rynmulia, 2011)

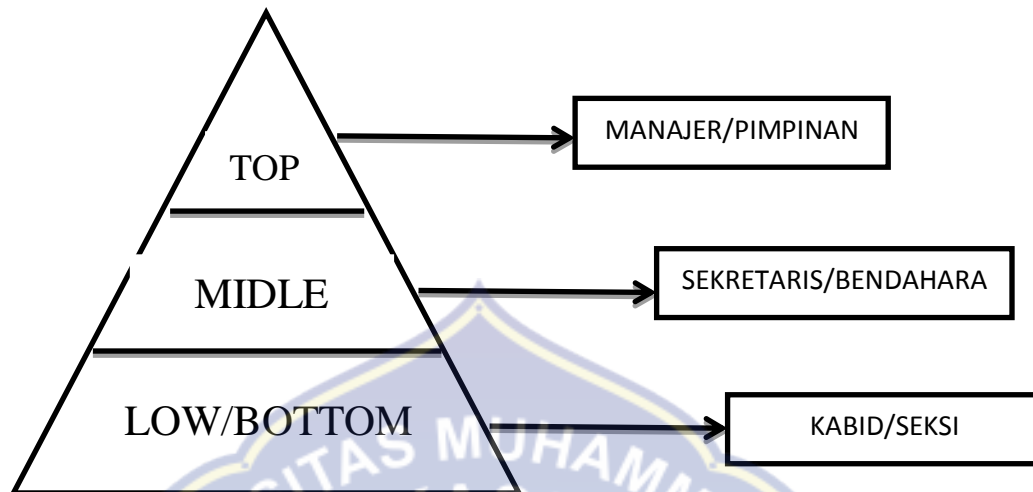
Street level birokrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat atau kepada publik dituntut untuk berlaku adil, hal itu menjadi tuntutan karena adil merupakan kualitas yang dicari oleh para klien publik atas kasus-kasus mereka, street level birokrasi yang adil akan melaksanakan semua hal aturan-aturan dengan saksama, dan hal itu harus mampu diterapkan kesemua orang tanpa ada mendiskriminasi oleh para oknum terhadap aturan, kemudian street level birokrasi dituntut harus memiliki pengetahuan yang berstandar tinggi dalam masalah-masalah dan lebih mampu untuk memahami terhadap karakteristik-karakteristik para pelanggan-pelanggan mereka. Dengan ini street level birokrasi lebih mampu memahami hal apa yang terjadi dimasyarakat dari pemerintah tersebut tergantung cara penyampaian untuk setiap para birokrat street level. (Rynmulia: 2011).

Street level birokrasi mencari cara untuk mengelola pekerjaan mereka sendiri, dimana para birokrasi level bawah harus memiliki karakteristik tertentu atau memiliki karakteristik sendiri, struktur aturan yang menyediakan raison d'être ke birokrasi tingkat bawah tidak hanya membuat kebijaksanaan

tertanam tapi, melangkah lebih jauh, melatih pengaruh penataan dalam cara peraturan diterapkan. Diambil dari atas atau dikembangkan dalam pekerjaan, situasi tertentu ditangani dengan berbagai cara yang sama seperti bagaimana situasi yang sesuai dengan fakta dilapangan atas kasus yang ditangani, dengan kata lain, ada prosedur operasi standar pada saat yang sama karena karakteristik lain dari pekerjaan mereka, birokrasi level bawah menerapkan prosedur standar dengan cara memaksimalkan kebijaksanaan mereka (Peter Hupe: 2007)

Lipsky (Peter Hupe: 2007) menjelaskan bahwa street level birokrasi harus menekankan profesional dalam diri mereka dalam menjalankan tugas mereka, sementara karyanya sendiri memberi sedikit perhatian pada orang-orang yang paling keras mengklaim diri sebagai profesional, penting untuk diketahui bahwa klaim otonomi yang mencirikan pekerjaan semacam itu dibuat oleh semua pekerjaan yang perannya dia jelajahi. Street level birokrasi berharap diperlakukan sebagai seorang profesional agar mampu dipercayai oleh publik untuk menggunakan kebijaksanaan untuk menangani tugas pekerjaan mereka secara adaptif. Tingkat dimana profesional yang didirikan atau dianggap sendiri, berhasil memberikan legitimasi atas otonomi pekerjaan mereka bervariasi, sebagian ditentukan oleh sejarah profesi mereka. Selain itu, dua dimensi lainnya mencirikan sifat profesi yaitu, ketidakpastian dan ketidakjelasan situasi dimana keahlian itu digunakan, kombinasi kebijaksanaan, menerapkan peraturan dan karakter pada dasarnya tidak ditentukan dari apa yang akan dihadapi oleh profesional (Peter Hupe: 2007).

Bagan Tingkatan Birokrasi



Sumber : Administrasi Publik2.blogspot.com

Dari gambar di atas dapat kita lihat bahwa ada 3 tingkatan level birokrasi yaitu Top manajer (pejabat pada level puncak yaitu kepala dinas) pada posisi top ini pejabat yang bertanggung jawab pada keseluruhan aktivitas organisasi yang dipimpinnya. Mereka menetapkan kebijakan operasional dan pedoman interaksi organisasi dengan lingkungannya, kemudian middle manajer (pejabat menengah yaitu sekretaris dan bendahara) yakni mereka yang bertanggung jawab manajer/pejabat di atasnya dan membawahi beberapa pejabat lini depan dan tingkatan yang terakhir adalah low/bottom manajer (pejabat/manajer pada level terdepan) yakni pejabat yang bertanggungjawab terhadap pegawai operasional saja.

D. Swasembada Jagung

Jagung merupakan sebuah paket komoditas strategis bagi perekonomian nasional, itu semua karena selain sebagai bahan pangan juga mampu untuk menjadi bahan baku utama pakan ternak, dengan meningkatnya kebutuhan jagung nasional, maka dari itulah pengembangan produksi jagung menuju

perwujudan swasembada harus tetap dilakukan secara konsisten, swasembada jagung dilakukan yang telah dicapai pada tahun 2009 harus dipertahankan dan ditingkatkan untuk mendukung ketahanan pangan nasional, penggunaan komoditas jagung lebih didominasi untuk bahan baku utama industri pakan ternak, yaitu sebesar 51 persen. Selanjutnya diikuti penggunaan bahan pangan antara lain pangan langsung, bahan baku minyak nabati dan makanan kecil sehingga dalam pengembangannya harus melihat potensi dan struktur kebutuhan secara komprehensif (Amar, 2011).

Berdasarkan peningkatan produksi jagung dalam upaya swasembada jagung maka pemerintah telah menetapkan beberapa program yang akan dilakukan dalam waktu ini oleh pemerintah sebagai upaya dalam mewujudkan swasembada pangan tersebut, kegiatan SLPTT merupakan sekolah lapangan bagi petani untuk menerapkan teknologi usahatani dengan penggunaan input untuk setiap produksi yang efisien menurut spesifik lokasi, program ini diharapkan mampu meningkatkan kemampuan petani dalam peningkatan produksi jagung, program tersebut di dukung oleh benih bermutu dan berlabel yang memiliki daya tumbuh dan virgon yang tinggi, sehingga dapat tumbuh lebih cepat sehingga ini dapat mempercepat produksi jagung (Amar: 2011).

Pengembangan produksi jagung merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk memenuhi permintaan kebutuhan jagung nasional yang sangat meningkat, hal itu harus dipenuhi oleh pemerintah. Dengan mengacu pada potensi sumberdaya lahan dan kinerja usaha tani jagung, komoditas jagung memiliki peluang yang sangat besar dalam pencapaian swasembada

jagung. Produktivitas rata-rata nasional yang dicapai sampai saat ini masih di bawah potensinya. Dalam kurung waktu lima tahun terakhir produktivitas jagung nasional itu meningkat rata-rata sebesar 4,78 persen yaitu dari 34,54 ku/ha PK (pipilan kering) pada tahun 2005 menjadi 42,10 ku/ha pada tahun 2009. Pencapaian tersebut masih dibawah potensi produktivitas dan varietas jagung yang ada. Produktivitas jagung komposit dapat mencapai 5-6 ton per-hektar, peningkatan produksi tersebut juga diikuti dengan harga jagung yang menguntungkan dimana pada tahun 2004 harga jagung sekitar rp.1.700/kg sedangkan pada tahun 2008 mencapai 3.000/kg hal itu terjadi karena adanya dukungan dari pusat sampai pemerintah daerah yang didukung juga dengan masih terbukanya peluang perluasan lahan atau areal dilahan-lahan perhutani, kehutanan, perkebunan dan lahan kering lainnya (amar,2011)

Swasembada jagung yang dilakukan oleh pemerintah didukung oleh ketersediaan lahan yang masih cukup terbuka sehingga hal tersebut membuat produktivitas jagung terus meningkat, pemerintah menjadikan jagung sebagai satu komoditas pangan strategis nasional, parameter peningkatan produksi jagung dapat dilihat dua tahun terakhir yang naik tajam, data badan pusat statistik, bahwa produksi jagung 2016 sebesar 23,58 juta ton atau naik 20,23 persen dibanding 2015 yang tercatat 19,61 juta ton naik 10,31 persen. Peningkatan produksi selama dua tahun tersebut memberikan nilai tambah rp. 26 trilliun, hal inilah yang membuat produksi jagung dipastikan mencukupi kebutuhan untuk pakan ternak, konsumsi langsung, bahan baku industri makanan dan lainnya (Arthur: 2017)

Pencapaian produksi jagung tersebut dalam upaya pencapaian swasembada jagung telah memenuhi kebutuhan jagung untuk industri pakan ternak sekitar 8,7 ton pertahun dan kebutuhan untuk makan pakan unggas rakyat 6 juta ton agar dapat dipenuhi dari jagung lokal. Dengan begitu, terlihat neraca jagung akan surplus lebih dari 3 juta ton, hal inipula yang mempengaruhi ketergantungan impor jagung, dilihat dari kinerja *import dependency ratio* (IDR), itu dapat terlihat pada Januari-Mei 2017 rasio menunjukkan bahwa ketergantungan impor jagung menurun secara baik drastis dibandingkan periode sama tahun 2016. Ikut juga nilai IDR Januari-Mei 2017 itu sebesar 2,06 persen, menurun sangat tajam jika dibandingkan Januari-Mei 2016 sebesar 6,84 persen, Januari-Mei 2017 tidak ada lagi proses impor jagung untuk pakan ternak, pada periode tersebut sangat diharapkan total impor jagung 278 ribu ton akan turun 68,38 persen dari 2016 menjadi sebesar 881 ribu ton (Arthur: 2017).

Swasembada jagung yang dilakukan untuk peningkatan Produksi jagung dalam rangka pemenuhan kebutuhan jagung nasional itu dapat dicapai melalui penanaman benih varietas unggul jagung hibrida. Varietas unggul jagung hibrida yang tersedia dapat dan dapat digunakan oleh petani adalah varietas semar -3 s/d semar -10 dan varietas bima -1 s/d, berdasarkan pada luas tanam jagung tahun 2010 selama 4,3 juta ha, komposisi benih jagung hibrida mencapai 54 persen, jagung komposit unggul bermutu 5 persen dan komposit non unggul 41 persen, jagung komposit unggul bermutu berproduksi tinggi perlu terus ditingkatkan. Sedangkan pertanaman jagung lokal diturunkan

secara bertahap dengan tetap memperhatikan kebutuhan untuk pangan lokal, luas penen jagung hibrida akan ditingkatkan dari 2,42 juta ha (2010) menjadi 3.74 juta ha pada tahun 2014 dengan pemakain benih 15 kg/ha, sedangkan jagung komposit dari 0,31 juta ha pada tahun 2010 menjadi 0,71 juta ha pada tahun 2014, luas panen jagung lokal secara bertahap diturunkan dari 1,47 juta ha (2010) menjadi 0,49 juta ha pada tahun tahun 2014. Komposisi pertanaman jagung diproyeksikan 75 persen jagung hibrida, 15 persen jagung komposit unggul bermutu dan 10 persen jagung lokal dari total sasaran luas panen sebesar 5 juta ha.peningkatan produktifitas ditargetkan meningkat dari 42 ku/ha (2010) menjadi 58 ku/ha pada tahun 2014 (Amar, 2011).

Tabel 1 Sasaran Luas Panen Jagung Per Jenis Jagung 2010-2014

Tahun	Sasaran Luas Panen (hektar)			
	Hibrida	Komposit	Lokal	Jumlah
2010	2.422.627	309.409	1.466.990	4.199.027
2011	2.707.831	372.449	1.320.120	4.400.400
2012	3.028.071	427.554	1.143.388	4.599.013
2013	3.356.838	675.524	768.000	4.800.000
2014	3.737.838	705.897	494.196	4.997.991

Sumber : Ditjen Tanaman Pangan. 2010

Pemerintah melalui kementerian pertanian mewujudkan swasembada pangan dilakukan melalui proses peningkatan produksi dan produktifitas pada tiga komoditas pangan yaitu padi,jagung dan kedelai ataupun itu yang lebih dikenal sebagai upaya khusus padi,jagung dan kedelai (UPSUS PAJALE). Kebijakan pemerintah inilah sering yang dinamai UPSUS PAJALE ini merupakan usaha

bersama yang dilakukan untuk mencapai sebuah capaian target yang telah ditetapkan melalui berbagai program untuk meningkatkan produksi maupun produktifas khusus tiga komoditas utama tersebut, peraturan kementerian pertanian republik indonesia nomor 03/permentan/OT/2015 tentang pedoman upaya khusus peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai inilah yang menjadi acuan atau pedoman pemerintah dalam pencapaian swasembada jagung (Rizki Gemala Busyra, 2016).

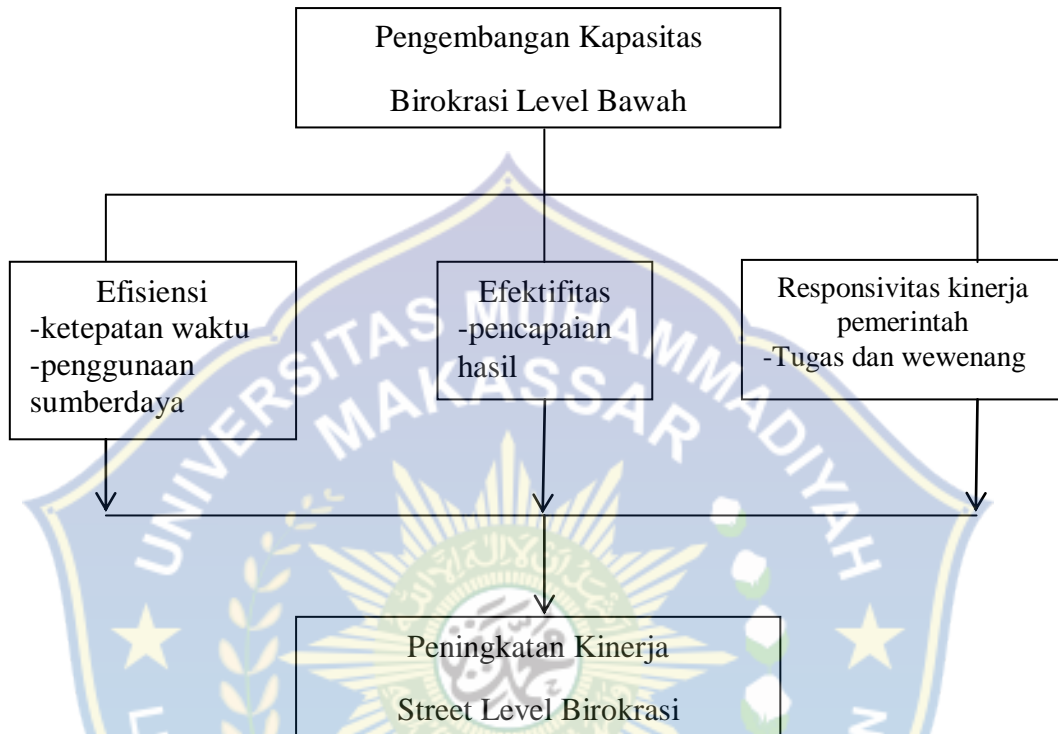
E. Kerangka Pikir

Pengembangan kapasitas sangat perlu untuk dilakukan terutama pada birokrasi level bawah (*street level buracracy*) dalam swasembada jagung di Kabupaten Takalar, karena birokrasi level bawah sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan ataupun pencapaian program pemerintah dalam peningkatan produksi jagung dalam hal pencapaian swasembada jagung untuk memenuhi kebutuhan jagung karena birokrasi level bawah yang turun langsung atau berhubungan langsung dengan program ini kepada masyarakat sehingga target yang ingin dicapai dapat terealisasi dengan baik.

Peningkatan kinerja *street level* birokrasi dapat diwujudkan melalui Pengembangan kapasitas birokrasi yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas SDM dalam rangka pemberian pelayanan kepada masyarakat, penulis berfokus pada model Grindle yaitu efisiensi, efektifitas dan responsivitas kinerja pemerintah yang dianggap cocok dalam pengembangan kapasitas birokrasi level bawah pada kasus swasembada jagung, maka uraian di ataslah

yang menjadi alur kerangka pikir dalam penelitian ini yang dapat diilustrasikan sebagai berikut :

Bagan Kerangka Pikir



F. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini dilihat dari latar belakang masalah kemudian dirumuskan dalam rumusan masalah dan dikaji berdasarkan teori dalam tinjauan pustaka, adapun fokus penelitian pengembangan kapasitas birokrasi level bawah dalam kebijakan swasembada jagung dikabupaten takalar, terdiri dari beberapa hal pokok yang perlu diuraikan yaitu :Efisiensi, Efektifitas dan Responsivitas kinerja pemerintah

G. Deskripsi Fokus Penelitian

- 1) Efisiensi

Efisiensi merupakan suatu ukuran ketepatan dalam penggunaan hal waktu (*time*) dan sumberdaya (*resources*) yang dibutuhkan sebagai guna mencapai suatu outcome

2) Efektifitas

Pencapaian tujuan secara tepat atau memilih tujuan-tujuan yang tepat dari serangkaian alternatif atau pilihan cara menentukan pilihan dari beberapa pilihan dari berbagai pilihan lainnya dan bisa juga diartikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan.

3) Responsivitas kinerja pemerintah

Kemampuan untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, serta mengembangkan program-program pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu dalam penelitian ini dilaksanakan selama dua bulan dimulai dari tanggal 12 Januari sampai 12 Maret 2019, lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Takalar yang merupakan daerah penghasil jagung yang menjadi salah satu daerah swasembada jagung dan berdasarkan dengan hasil observasi awal dan informasi online penelitian menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan para birokrasi level bawah tentang program swasembada jagung itu masih kurang paham dan tidak efektifnya pembagian kerja serta tidak maksimalnya penyuluhan yang dilakukan tentang swasembada jagung.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan didalam proses penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif untuk menganalisis Pengembangan Kapasitas Birokrasi Level Bawah Dalam Kebijakan Swasembada Jagung di Kabupaten Takalar.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu tipe penelitian kualitatif untuk mengetahui Pengembangan Kapasitas Birokrasi Level Bawah Dalam Kebijakan Swasembada Jagung di Kabupaten Takalar.

C. Sumber Data

Untuk memperoleh data maka dilakukan observasi awal yang merupakan instrumen pengumpulan data yaitu dengan melakukan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti yang dimaksudkan untuk mendapatkan data primer dan sekunder yang relevan dengan permasalahan penelitian.

1. Data primer

Yaitu data informasi langsung dikumpulkan dari lokasi penelitian melalui informan yang telah dipilih dengan menggunakan teknik wawancara dengan orang atau instansi yang dianggap bisa menjadi informan dengan mengajukan pertanyaan yang mengarah kedalam informasi.

2. Data sekunder

Data sekunder, yaitu data yang dikumpulkan oleh peneliti melalui berbagai laporan-laporan atau dokumen-dokumen yang bersifat informasi tertulis, adapun laporan atau dokumen yang bersifat informasi tertulis dikumpulkan peneliti adalah data yang diambil dan berasal dari jurnal, koran, buku, majalah, atau sumber-sumber lainnya yang dapat mendukung data yang diperlukan dalam proses penelitian.

D. Informan Penelitian

Penentuan narasumber (Informan) dalam penelitian ini untuk di wawancarai secara mendalam dilakukan dengan menggunakan tehnik purposive sampling, peneliti memilih orang tertentu yang dianggap memiliki pengetahuan dan informasi mengenai Pengembangan Kapasitas Birokrasi Level Bawah Dalam Swasembada Jagung, informan tersebut yaitu :

NO	NAMA	JABATAN	INISIAL
1.	Ir. Muh Iqbal, M.Si	Sekretaris dinas	IB
2.	Hj. Nurhayati, SP, M.Si	Kepala bidang tanaman pangan dan hortikultura	NH
3.	Hj. Ernawati, SP. M,Si	Kepala seksi produksi	EW
4.	Hj. Kasmawati, S.ST	Kepala seksi perbenihan	KW
5.	Hamsiah Arif	Penyuluh	HA
6.	Hanafi	Penyuluh	HF
7.	Muh Nurdin Nasution	Penyuluh	MNN
8.	Mustar	Penyuluh	MT
9.	Khalid, SP	Staff bidang TPH	KI
10.	Muh Arham, SP	Staf Bidang TPH	MA
	Jumlah	10 Orang	

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tehnik pengumpulan data yaitu :

1) Wawancara langsung

Wawancara dilakukan dengan informan yang dianggap mampu memberikan data tentang pengembangan kapasitas yaitu sekretaris dinas pertanian, kepala bidang tanaman pangan dan hortikultura, kepala seksi produksi, kepala seksi perbenihan, penyuluh dan pendamping program. Dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah di siapkan.

2) Observasi (pengamatan)

Observasi dengan cara turun langsung ke kantor dinas pertanian Kab.Takalar yang diteliti, guna untuk mendapatkan informasi yang jelas, jenis observasi ini juga dapat dilakukan dengan cara terbuka, cara ini akan mampu menggorek kejujuran informan didalam hal untuk memberikan informasi yang sebenarnya.

3) Dokumentasi

Data-data yang di dapatkan oleh peneliti yang berkaitan dengan objek penelitian didapatkan dari sumber buku, arsip maupun data yang tersimpan dalam website.

F. Teknik Analisis Data

Menurut Mc.Drury (Moleong :2014 :248) mengatakan bahwa analisis data yang mampu untuk digunakan dalam penelitian dapat dilakukan dengan menerapkan langkah-langkah sebagai berikut :

1) Reduksi data

Mereduksi data dalam artian bahwa merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian, data yang telah berhasil direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas.

2) Sajian data

Dalam hal penelitian kualitatif penyajian dalam menyajikan data selain data yang dalam bentuk narasi kalimat, dapat juga meliputi berbagai jenis

matrik, gambar atau skema jaringan kaitan kegiatan dan juga waktu sebagai pendukung narasi. Penarikan kesimpulan

Dalam awal pengumpulan data peneliti sudah harus mulai mnegerti apa arti hal-hal yang kita ditemui dengan mencatat peraturan-peraturan sebab akibat, dan berbagai proporsi sehingga penarikan kesimpulan dapat dipertanggung jawabkan.

G. Keabsahan Data

Moleong (2014) mengemukakan bahwa pengabsahan data adalah bentuk batasan yang sangat berkaitan dengan suatu kepastian, bahwa yang berukur adalah benar-benar merupakan variabel yang ingin diukur, keabsahan ini juga dapat dicapai dengan sebuah hal proses pengumpulan data yang cepat, salah satu upaya caranya adalah dengan proses tringulasi, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan segala sesuatu yang lain diluar dari data itu untuk kepentingan ataupun keperluan pengecekan atau sebagai perbandingan terhadap data itu.

1. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber adalah membandingkan dengan melakukan pengecekan ulang dengan kepercayaan suatu bentuk jenis informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda, misalnya, membandingkan hasil pengamatan yang dilakukan dengan wawancara dan informan, kemudian membandingkan apa yang kita dapatkan baik apa yang dikatakan umum dengan yang dikatakan pribadi, membandingkan hasil wawancara dengan dokumentasi

yang ada untuk melihat perbedaan dan kesamaan pendapat yang dapat dilihat dari hasil wawancara dan dokumentasi.

2. Triangulasi teknik

Tehnik data untuk memperoleh informan yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan tehnik pengumpulan data sebagai berikut.

Untuk menguji akuratnya sebuah data maka peneliti menggunakan tehnik tertentu yang berbeda dengan tehnik yang digunakan sebelumnya.

3. Triangulasi waktu

Triangulasi waktu digunakan untuk validasi data yang berkaitan dengan pengecekan data berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu.

Perubahan suatu proses dan perubahan manusia mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Untuk mendapatkan data yang sah melalui observasi penelitian perlu diadakan sebuah proses pengamatan tidak hanya satu kali pengamatan saja.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskriptif Objek Penelitian

1. Gambaran Kabupaten Takalar

a. Kondisi Geografis

Kabupaten takalar adalah salah satu dari 24 kabupaten atau kota di provinsi sulawesi-selatan yang beribukota di pattallassang secara geografis terletak antara $5^{\circ} - 5^{\circ}38'$ Lintang Selatan dan $119^{\circ}22' - 119^{\circ}22'$ Bujur Timur. Luas wilayah Kabupaten Takalar tercatat $566,51 \text{ km}^2$ yang terdiri dari 9 Kecamatan, 76 Desa dan 24 Kelurahan.

b. Administrasi Wilayah

Secara administrasi wilayah Kabupaten Takalar berbatasan dengan :

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kabupaten Gowa
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kabupaten Jeneponto
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Laut Flores
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Selat Makassar

Jarak Ibu Kota Kabupaten Takalar dengan Ibu Kota Provinsi Sulawesi

Selatan mencapai 45 km tang melalui Kabupaten Gowa.

c. Visi dan Misi Kabupaten Takalar

1. Visi Kabupaten Takalar

Visi Kabupaten Takalar yang hendak dicapai pada tahun 2013 – 2018

adalah :

“Takalar terdepan dalam pelayanan menuju masyarakat sejahtera,
berkeadilan, beriman dan bertaqwa”

2. Misi Kabupaten Takalar

Dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Takalar tersebut, maka misi pembangunan Kabupaten Takalar adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia
- b. Mewujudkan pemerintahan yang bersih
- c. Meningkatkan pendapatan asli daerah
- d. Meningkatkan kesejahteraan rakyat

2. Gambaran Umum Dinas Pertanian

a. Latar Belakang

Kabupaten Takalar yang berada pada bagian selatan Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai kondisi alam dataran rendah, menengah dan dataran tinggi dimana sebagian dari luas wilayah tersebut merupakan lahan untuk sektor pertanian. Sektor pertanian di Kabupaten Takalar yang meliputi sub sektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan dan peternakan merupakan sektor yang memberikan kontribusi terbesar bagi pembentukan struktur ekonomi. Besarnya potensi itulah yang merupakan salah satu faktor yang melatarbelakangi dibentuknya Dinas Pertanian Kabupaten Takalar, dan diharapkan melalui pembentukan Dinas Pertanian dapat membantu mengembangkan sektor tersebut, melalui keberadaannya, Dinas Pertanian selalu berusaha melakukan program-program yang bertujuan untuk pengembangan

produksi di bidang pertanian, perkebunan dan peternakan. Program-program yang telah dilakukan oleh Dinas Pertanian diantaranya adalah pengadaan prasarana dan sarana pendukung kegiatan produksi, pengembangan teknologi, peningkatn SDM melalui pelatihan-pelatihan dan program-program pendukung lainnya.

b. Dasar Hukum, Kedudukan dan Tugas Pokok

Dinas Pertanian Kabupaten Takalar dibentuk berdasarkan peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 08 Tahun 2013 Tanggal 25 November 2013 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Takalar sebagaimana telah dirubah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 07 Tahun 2016 Tanggal 19 Desember 2017 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dimana Dinas Pertanian merupakan Dinas tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian. Tugas pokok Dinas Pertanian diatur dalam peraturan Bupati Takalar Nomor 42 Tahun 2016 Tanggal 28 Desember 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Takalar yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan dibidang pertanian dan di pimpin oleh seorang Kepala Dinas dengan kedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

c. Fungsi Dinas Pertanian

Untuk menyelenggarakan tugas Dinas Pertanian mempunyai fungsi :

1. Merumuskan kebijakan teknis dibidang sarana dan prasarana pertanian, tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan dan penyuluhan pertanian.
2. Menyenggarakan pelayanan dalam bidang sarana dan prasarana pertanian, tanaman pangan hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan dan penyuluhan pertanian.
3. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan urusan di bidang sarana dan prasarana pertanian, tanaman pangan hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan dan penyuluhan pertanian.
4. Menyenggarakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan urusan di bidang sarana dan prasarana pertanian, tanaman pangan hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan dan penyuluhan pertanian.
5. Melaksanakan pembinaan dan pelaksanaan tugas dalam bidang pertanian.

d. Visi dan Misi Dinas Pertanian

1. Visi

“Menuju Pertanian yang Produktif, Berkualitas dan Ramah Lingkungan
dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Petani”

2. Misi

Untuk mencapai Visi yang telah dijabarkan di atas, maka Dinas Pertanian Kabupaten Takalar akan melaksanakan Misi sebagai berikut :

- a. Meningkatkan produksi dan produktivitas untuk ketersediaan pangan dan bahan industri.
- b. Meningkatkan nilai tambah daya saing dan pemasaran produk, perkebunan, kehutanan dan peternakan.
- c. Mendorong terwujudnya pertanian organik yang ramah lingkungan.
- d. Meningkatkan konservasi dan rehabilitasi sumber daya hutan.
- e. Susunan dan Struktur Organisasi

Pemerintah Kabupaten Takalar pada tahun 2016 telah membentuk Dinas Pertanian yang strukturnya berubah dari tahun 2013 yang sebelumnya bernama Dinas Pertanian dan Kehutanan dan di Pimpin oleh seorang Kepala Dinas. Sejak terbentuknya Dinas Pertanian dan Kehutanan yang kemudian berubah menjadi Dinas Pertanian, banyak perkembangan yang sudah dicapai dalam upaya memajukan sektor pertanian di Kabupaten Takalar. Majunya pembangunan pada sektor pertanian sangat di pengaruhi oleh seberapa besar kapasitas sumber daya manusia dalam merumuskan formulasi dan pola baru konsep pembangunan dan pertanian. Hal ini didukung oleh kemampuan sumber daya manusia yang semakin profesional dan sumber dana atau pagu anggaran yang disediakan oleh APBD Takalar yang senantiasa mengalami peningkatan dari tahun ketahun. Guna melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diemban, Dinas Pertanian Kabupaten Takalar memiliki perangkat organisasi yang dibentuk berdasarkan kewenangan dan bidang tugas masing-masing. Perangkat organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Takalar terdiri atas :

1. Kepala Dinas

2. Sekretariat
 - Sub Bagian Perencanaan.
 - Sub Bagian Keuangan.
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian
 - Seksi Lahan dan Irigasi, Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian.
 - Seksi Pembiayaan dan Investasi.
4. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura
 - Seksi Produksi, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura.
 - Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura.
5. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan
 - Seksi Produksi, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan.
 - Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
6. Bidang Perkebunan
 - Seksi Produksi, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan.
 - Seksi Perbenihan dan Perlindungan Perkebunan.
7. Bidang Penyuluhan Pertanian
 - Seksi Kelembagaan, Metode dan Informasi Penyuluhan Pertanian.
 - Seksi Ketenagaan Penyuluhan Pertanian.

Selain sekretariat dan kelima bidang diatas terdapat pula Unit pelaksana Teknis dan Unit Pelaksana Teknis Dinas yang terdapat pada setiap kecamatan dan kawasan pulau, yaitu :

- Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Benih Daerah.
- Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kec. Polongbangkeng Utara.
- Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kec. Polongbangkeng Selatan.
- Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kec. Pattallassang.
- Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kec. Mappakasunggu.
- Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kec. Mangarabombang.
- Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kec. Galesong Selatan.
- Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kec. Galesong Utara.
- Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kec. Galesong.
- Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kec. Sanrobone.
- Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kec. Kawasan Tanakeke.



B. Pengembangan Kapasitas Birokrasi level bawah pada Swasembada jagung di Kabupaten Takalar (Studi kebijakan Swasembada jagung).

1. Efisiensi

Efisiensi yang merupakan perbandingan terbaik antara input dan output pelayanan. Secara ideal, pelayanan akan efisien apabila birokrasi pelayanan dapat menyediakan input pelayanan, seperti biaya dan waktu pelayanan yang meringankan masyarakat pengguna jasa. Demikian pula pada sisi output secara ideal harus dapat memberikan produk pelayanan yang berkualitas, terutama dari aspek biaya dan waktu pelayanan, efisiensi pada sisi input dipergunakan untuk melihat seberapa jauh kemudahan akses publik terhadap sistem pelayanan yang di tawarkan. Efisiensi pelayanan birokrasi yang harusnya mampu untuk memberikan pelayanan yang tidak berbelit-belit kepada masyarakat dengan kata lain bahwa masyarakat dapat dengan mudah atau tidak rumit dalam mendapatkan pelayanan yang tawarkan oleh birokrasi.

- a. merujuk pada efisiensi yang berfokus pada proses pemberian pelayanan yang mudah untuk di akses oleh masyarakat sehingga hal ini juga bisa membantu pemerintah dalam pencapaian tujuannya, pelayanan yang tidak berbelit-belit tentunya adalah harapan bagi semua masyarakat, pelayanan yang tidak berbelit-belit merupakan salah satu prinsip dari kualitas pelayanan publik yang merupakan hal yang sangat penting untuk di perhatikan mengingat bahwa pencapaian tujuan akan lebih mudah untuk di capai jika pelayanan yang diberikan itu berkualitas .merujuk pada prosedur yang dilakukan oleh dinas pertanian dalam program

swasembada jagung ini pada petani ini. Hal diatas didukung oleh pendapat Sekdis Pertanian yang mengatakan bahwa :

“prosedurnya itu kalau untuk sampe dipetani panjang prosesnya tapi kalau secara teknis itu ditangani oleh bidang tanaman pangan, kemudian bidang tanaman pangan sampaikan ke kordinator penyuluh di setiap kecamatan nanti itu di kecamatan dibagi berdasarkan potensi lahan masing-masing rkpp jadi setelah itu penyuluh membuat cpcl bersama petani lalu di setor ketanaman pangan terus diverifikasi oleh tanaman pangan lalu di lanjutkan ke provinsi dan pusat untuk ketersediaan benih” (Hasil Wawancara IB 4 februari 2019).

Hal diatas didukung oleh pendapat Kabid Tanaman Pangan dan Horticultural yang mengatakan bahwa :

“inikan kelompok petani sebagai pelaksana kegiatan dilapangan terus di persawahan kan ada namanya BPP(balai penyuluh pertanian) itu di tingkat kecamatan kalau disini tanaman pangan kordinasinya yah mungkin sampai di tingkat provinsi dan pemda pasti dilibatkan disini ” (Hasil Wawancara NH 28 Januari 2019).

Dari hasil wawancara diatas informan IB dengan NH menunjukkan bahwa pada prosedur pelayanan dalam program swasembada jagung secara teknis ditangani oleh bidang tanaman pangan dan horticultural yang secara langsung berkordinasi sampai pada tingkat Provinsi dan Pemda. Sedangkan kelompok petani sebagai pelaksana kegiatan dilapangan dan pada tingkat kecamatan disebut BPP yang menangani langsung dipersawahan.

Hal diatas didukung oleh pendapat Kepala Seksi Produksi bidang TPH yang mengatakan Bahwa:

“kalau kita disini prinsipnya hanya penerima jadi kita itu kabupaten hanya menyiapkan CPCL yang diajukan oleh petani dan setelah itu kita masukkan lagi itu CPCL di provinsi, jadi itu petani

tidak langsung dipenuhi itu CPCLnya” (Hasil Wawancara EW 28 Januari 2019).

Kemudian pendapat Staf Seksi Produksi yang mengatakan bahwa :

“biasanya itu supaya lebih memudahkan petani untuk pengajuan benih dan lahan tanam kita lakukan sekolah lapang, pelatihan petani biasanya kita undang atau datangkan pemateri dari dinas kadang dilapangan kita undang juga dinas provensi dalam memberikan pelatihan jadi disitu biasa petani langsung disuruh bikin proposal yang diharapkan langsung ditindak lanjuti oleh provensi” Hasil Wawancara KI 28 januari 2019).

Dari hasil wawancara diatas informan EW dengan KI menunjukkan bahwa pada prosedur pelayanan dalam program Swasembada Jagung tersebut yaitu melalui sekolah lapang atau biasa juga pemerintah melakukan pelatihan kepada petani jagung.

Pendapat informan diatas sejalan dengan pendapat Penyuluh Desa Bentang yang mengatakan bahwa :

“yaa prrogram swasembada jagung ini biasanya kita itu mengadakana pelatihan langsung yaa kemasyarakat ee khususnya petani jagung. Nah dari situlah mereka tahu tentang prosedur dalam prgoram ini.”(Hasil Wawancara MNN 21 januari 2019).

Hal diatas didukung oleh pendapat Penyuluh Desa Galesong yang mengatakan bahwa :

“proses prosedur dalam program ini yaa.. tentunya kan dari pusat terlebih dahulu, kemudian provinsi kemudian ke kita maksudnya ke kabupaten lalu Dinas yaa nanti dinas terkait kan ada petugas lapangan, nah merekalah yang menyampaikan program tersebut ke petani jagung pada saat ada pelatihan begitu. (Hasil Wawancara HF 21 Januari 2019).

Dari hasil wawancara diatas informan MNN dengan HF menunjukkan bahwa dalam prosedur pelayanan dalam program Swasembada jagung tersebut

tentunya mempunyai alur dari atas ke bawah dalam arti lain program tersebut dimulai dari pusat sampai ke provinsi dan bahkan ke kabupaten kemudian dinas terkait hingga ke masyarakat.

Dari hasil wawancara diatas beberapa informan terkait pada prosedur pelayanan dalam program swasembada jagung ini dapat disimpulkan bahwa adanya alur yang dimulai dari pusat sampai kepada Dinas terkait. Hal tersebut selain alur dari atas kebawah, secara teknis Dinas Pertanian Kabupaten Takalar yang menjalankan program tersebut, mempunyai petugas lapangan dalam hal itu olehnya program Swasembada Jagung sampai pada masyarakat petani yang dirangkaikan pada saat pelatihan dilapangan dan prosedur ini tentunya masih berbelit-belit dan tidak terlihat adanya kemudahan pelayanan yang didapatkan oleh petani dikarenakan alur kordinasi yang cukup panjang yang dilakukan oleh pemerintah.

- b. bagian kedua yang berfokus pada efisiensi pelaksanaan program swasembada jagung ini dengan memperhatikan penggunaan sumber daya ke Proses pelaksanaan program swasembada jagung. Hal ini menunjukkan bahwa pada proses pelaksanaan program tersebut yang terlibat didalamnya tentunya pemerintah itu sendiri dengan masyarakat petani jagung. Hal diatas didukung oleh pendapat Ketua bidang tanaman pangan dan horticultural yang mengatakan bahwa:

“jadi kita itu gerakkan semua pihak-pihak yang ada untuk ditingkat lapangan barangkali kan yang menjadi pelaksana itu adalah kelompok tani, jadi yang mungkin berperan juga disini adalah PPL memberikan penyuluhan kepada kelompok tani terus pendataan

lahan pertanian itu dilakukan oleh PPL dan semua petugas pertanian (Hasil Wawancara NH 28 Januari 2019).

Hal diatas didukung oleh pendapat Staf Seksi Produksi yang mengatakan bahwa :

“dia pelaksanaannya itu tadi kayak pelatihan terus dilapangan disosialisasikan ke petani toh biar tidak bosan petani harus di variasi, jadi kita itu memanfaatkan penyuluh yang sudah kita bai perkecamatan supaya lebih mudahki ini salurkan program swasembada. (Hasil Wawancara KI 28 januari 2019).

Dari hasil wawancara diatas informan IB dengan KI menunjukkan bahwa yang terlibat dalam proses pelaksanaan program swasembada jagung tersebut tentunya pemerintah itu sendiri kemudian kelompok tani atau masyarakat itu sendiri serta petugas penyuluh dilapangan yang terjun langsung bersama dengan masyarakat.

Namun lain hal dengan pendapat informan yang satu ini yang mengutarakan pandangannya terhadap pelaksanaan program tersebut yang lebih melihat pada prosedur dan waktu pelaksanaan Program Swasembada Jagung di Kabupaten Takalar, yaitu pendapat Sekdis Pertanian yang mengatakan bahwa :

“jadi kalau dibilang masalah sumber daya itu kita itu di dinas dikontrol ini program melalui PPL dan penyuluh karna dia di lapangan dan pelaksanaannya itu setiap tahun bulan november itu pemutahiran cpcl oleh petani di dampingi oleh PPL dan untuk musim tanam november desember kalau jagung, kemudian di februari, april dan agustus” (Hasil Wawancara IB 4 february 2019).

Hal diatas didukung oleh pendapat kepala bidang Produksi TPH yang mengatakan bahwa :

“eh begituji kan kita sudah siapkan CPCLnya terus kita bikinkan SK , jadi kita hanya sosialisasi dulu di kelompok melalui PPL atau

kita langsung dari dinas sudah itu mereka sudah bikinkan CPCLnya nanti itu dimasukkan di BPP lalu di rekap terus dimasukkan di bidang dan bidang yang Skkan diTTD oleh kadis lalu di serahkan ke provensi dan disitu dinas provensi kasi kita barang. (Hasil wawancara EW 28 januari 2019).

penyuluh desa galesong juga mengemukakan pendapatnya yang senada dengan hal diatas, yang mengatakan bahwa :

“tidak susah maki kita ini kalau masalah dilapangan pelaksanaanya anjo haruski petani dulu buat cpcl dipandu oleh PPL terus ke kecamatan dan kecamatan ke kabupaten dan ke provensi tapi petani itu laksanakan ki semua dilapangan kah dia yang tanam (Hasil Wawancara HF 21 januari 2019).

Dari hasil wawancara diatas informan IB dengan EW dan juga HF menunjukkan bahwa pada pelaksanaan program tersebut lebih cenderung kepada prosedur yang dilakukan pemerintah seperti pembuatan CPCL dilakukan oleh masyarakat yang diarahkan langsung oleh anggota ppl. Dan setiap tahun adanya pemutakhiran mengecek kembali CPCL tersebut kemudian pihak Dinas terkait memberikan kepada bidang yang bertanggung jawab kemudian diserahkan ke provinsi.

Dari hasil wawancara diatas dibeberapa informan dapat disimpulkan bahwa terkait dengan efisiensi penggunaan sumber daya pada program swasembada jagung di Kabupaten Takalar adalah selain dari pihak Dinas Pertanian itu sendiri sebagai pengadopsi program tersebut, tentunya kelompok tani sebagai sasaran utama dalam program tersebut juga sebagai pelaksana dan dikawal langsung oleh penyuluh disetiap desa yang ada di Kabupaten Takalar dan juga pelaksana ditingkat provinsi yang disebut sebagai pengamat dilapangan.

Dari hasil wawancara diatas di beberapa informan dapat disimpulkan bahwa pada indikator efisiensi yang merujuk pada penyederhanaan prosedur dan pemanfaatan sumber daya dapat dilihat bahwa program ini belum terlihat efisiensi dalam hal prosedur pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah sendiri itu terlihat dari berbelit-belitnya proses yang terjadi pada program ini, dimana penyalur program ini masih harus tetap bermohon ke provinsi bahkan sampe di pusat, padahal petani sebagai target sasaran dari program swasembada jagung ini tidak mempunyai cukup waktu untuk menunggu permohonan pemberian bibit dikarenakan petani menyesuaikan jenis tanam yang dilakukan dengan kondisi cuaca yang bisa sewaktu-waktu berubah. Kemudian proses prosedur atau alur dalam menjalankan program tersebut tentunya dimulai dari pemerintah pusat kemudian diantar ke provinsi terkait hingga kabupaten mengadopsi program tersebut sampai pada Dinas Pertanian Khususnya Kabupaten Takalar. Dan dari dinas itu sendiri yang mempunyai petugas lapangan, atau penyuluh yang menyampaikan langsung kepada masyarakat petani jagung terkait dengan program Swasembada jagung tersebut. selain dari pusat sampai pada dinas Kabupaten Takalar, masyarakat petani jagung pun secara langsung ikut serta dalam melaksanakan program tersebut sebagai selaku kelompok sasaran, kemudian dalam hal efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya dalam hal memudahkan kinerja dinas itu sudah terlihat efisien kinerja dari dinas dikarenakan dinas telah mampu untuk memanfaatkan tenaga PPL dan penyuluh yang ada di setiap kecamatan yang bertugas untuk mengawasi jalannya program dilapangan sehingga hal ini juga ikut memudahkan dinas untuk mengontrol bagaimana

jalannya program tersebut dilapangan dan mengetahui apa saja yang menjadi kebutuhan petani dilapangan.

2. Efektifitas

Efektifitas merupakan suatu keadaan yang menunjukkan sejauh mana rencana dapat tercapai. Semakin banyak rencana yang dapat dicapai, semakin efektif pula kegiatan tersebut, sehingga dapat pula kata efektifitas dapat juga diartikan sebagai tingkat keberhasilan yang dapat dicapai dari suatu cara atau usaha tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atau jasa kegiatan yang dijalankannya, efektifitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan

- a. pada indikator efektifitas yang berfokus pada pencapaian hasil . Hal ini terlihat bahwa pada pengembangan kapasitas birokrasi level bawah pada program Swasembada Jagung di Kabupaten Takalar ini pemerintah mengharapkan adanya peningkatan produksi jagung seperti yang diinginkan oleh Kepala Daerah Kabupaten Takalar yaitu menjadikan Takalar sebagai produksi utama dalam Swasembada Jagung yang bisa di ekspor keluar negeri. Selain itu tentunya pemerintah menginginkan agar masyarakat Kabupaten Takalar bisa merasakan kesejahteraan hidup serta meningkatnya pendapatan masyarakat serta pemerintah tentunya menginginkan reward sebagai penghasil jagung yang terkenal. Hal diatas

tentunya didukung oleh pendapat Sekdis Pertanian yang mengatakan bahwa :

“nah tentunya kita yang pertama mencapai target yang kita canamkan kemudian dengan tercapainya target kita harapkan peningkatan pendapatan masyarakat petani sehingga bisa meningkat dari menanam jagung” (Hasil Wawancara 4 Februari 2019).

Senada dengan pendapat diatas, Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Horticultural yang mengatakan bahwa :

“harapannya yah semoga program itu tercapai dan adanya peningkatan pendapatan petani yang mengarah kepada peningkatan kesejahteraan petani kan itu visi dari dinas pertanian jadi mudah-mudahan pembinaan ini terus dilakukan hingga tercapai peningkatan produksi yang mengarah kepada peningkatan pendapatan petani dan akhirnya bisa tercapai yang namanya kesejahteraan petani” (Hasil Wawancara NH 28 januari 2019).

Dari hasil wawancara diatas informan IB dengan NH menunjukkan bahwa harapan pada program ini hal yang pertama yaitu dapat mencapai target yang diinginkan selain itu juga diharapkan adanya peningkatan pendapatan yang lebih tepatnya mengarah pada peningkatan kesejahteraan petani.

Selain informan diatas, pendapat diatas juga didukung oleh didukung oleh Kepala seksi produksi bidang TPH yang mengatakan :

“yang pastinya peningkatan produksi yang akan menghasilkan peningkatan pendapatan petani untuk kesejahteraan” (Hasil Wawancara EW 28 Januari 2019)

Hal diatas didukung oleh Staf Seksi produksi yang mengatakan bahwa :

“yah tentu kita minta produksi meningkat, kesejahteraan petani bertambah, kalau produksi meningkat yah pasti kesejahteraan juga ikut mneingkat” (Hasil Wawancara MA 28 januari 2019).

Dari hasil wawancara diatas informan EW dengan MA menunjukkan bahwa harapan pada program Swasembada Jagung dapat meningkatnya produksi jagung dan kesejahteraan masyarakat petani jagung di Kabupaten Takalar.

Sejalan dengan pendapat diatas, informan yang satu ini juga mengemukakan pendapatnya terkait dengan harapan pada program tersebut yaitu Staf Seksi Produksi yang mengatakan bahwa :

“iya kalau saya secara pribadi sebenarnya harus ada reward, karna jangan Cuma ekspor tapi tidak ada penghargaan dari pemerintah pusat” (Hasil Wawancara KI 28 januari 2019).

Sejalan dengan hal tersebut diatas, penyuluh desa bentang yang mengatakan bahwa :

“yah itumi peningkatan produksi dan peningkatan pendapatan petani, dan kita juga sebenarnya menginginkan reward ya jadi saya rasa itu harapan kita semua disini” (Hasil Wawancara MNN 21 januari 2019).

Dari hasil wawancara diatas informan KI dengan MNN menunjukkan bahwa harapan yang pada program Swasembada Jagung tersebut tidak jauh berbeda dari pendapat informan yang lainnya yang menginginkan agar hasil produksi jagung di Kabupaten Takalar bisa berkembang dan di ekspor agar penghasilan petani pun bisa meningkat dalam kata lain seimbang dengan pengeluaran keseharian masyarakat petani jagung khususnya. Selain itu juga dari pihak pemerintah tentunya menginginkan reward atau penghargaan dari pemerintah pusat terkhusus pada Kabupaten Takalar sebagai salah satu yang menjalankan program tersebut.

Dari hasil wawancara diatas dibeberapa informan dapat disimpulkan bahwa harapan pada program swasembada jagung di Kabupaten Takalar tentunya hal yang pertama adalah mengutamakan takalar sebagai produksi utama jagung kemudian pemerintah juga menginginkan agar program tersebut semakin berkembang dan bisa mengekspor keluar kota dan bahkan sampai pada luar negeri. Selain itu harapan lainnya tentunya masyarakat juga menginginkan bantuan benih dan juga lahan ternak agar lebih dominan sehingga penghasilan petani jagung agar lebih membaik dan meningkat disetiap tahunnya. Hal inilah yang menjadi harapan baik pemerintah dan juga masyarakat itu sendiri.

- b. kedua yang merujuk pada indikator efektifitas ke keberhasilan pada program Swasembada Jagung di Kabupaten Takalar. Hal diatas dijabarkan oleh Sekdis Pertanian yang mengatakan bahwa :

“yang pertama itu lahan ditanami jagung, ke dua tentu produksinya meningkat dari 5 ton mendekati 10 ton” (Hasil Wawancara IB 4 februari 2019).

Hal diatas didukung oleh pendapat Kepala Seksi Bidang Produksi yang mengatakan bahwa :

“kita kan dari tahun ketahun dilihat dari berapa persen peningkatannya” (Hasil Wawancara EW 28 januari 2019).

Dai hasil wawancara diatas informan IB dengan EW menunjukkan bahwa adanya peningkatan selama program swasembada jagung ini dilaksanakan diKabupaten Takalar. Baik dari segi produksi maupun pengadaan pakan. Seperti yang dijabarkan oleh Kepala Bidang ketahanan Pangan dan Holticultural senada dengan hal diatas yang mengatakan bahwa :

“mungkin bisa dilihat dari terpenuhinya kebutuhan ternak, jadi mungkin bisa dilihat dari mungkin kita di takalar sudah tidak kekurangan lagi pakan ternak yang bahan bakunya jagung yah mungkin salah satu indikator keberhasilan bisa dilihat disitu” (Hasil Wawancara NH 28 januari 2019).

Hal diatas didukung oleh pendapat Staf Seksi Produksi yang mengatakan bahwa :

“sebenarnya kalau tolak ukur keberhasilan ini diliat dari tidak perlu harus ada bantuan, jagung itu misalnya petani itu ada penangkarnya tidak perlu harus disuruh supaya istilahnya bisa mandiri” (hasil Wawancara KI 28 januari 2019).

Dari hasil wawancara diatas informan NH dengan KI menunjukkan bahwa keberhasilan program swasembadfa jagung di Kabupaten Takalar tersebut bisa dilihat dari segi terpenuhinya kebutuhan ternak seperti pakan ternak dan bahan baku masyarakat sudah tidak kekurangan lagi dan bahkan jika petani jagung sudah mempunyai penangkar dan tidak harus menunggu arahan dari pemerintah, sudah bisa dikategorikan berhasil dalam artian masyarakat sudah mandiri akan hal tersebut.

Kemudian pendapat informan lainnya yang mengutarakan pendapatnya terkait dengan sudah sejauh mana keberhasilan dari program swasembada jagung di Kabupaten Takalar tersebut, seperti Staf Seksi Produksi yang mengatakan bahwa :

“yang pertama itu kita liat dari luas tanam kalau target luas tanam kita capai berarti berhasil.... misal kalau takalar itu 3x tanam rata-rata sekitar 2000 hektar 1x tanam kemudian hasil produksinya meningkat” (Hasil Wawancara MA 28 januari 2019).

Hal diatas didukung oleh pendapat penyuluh desa kale bentang yang mengatakan bahwa :

“tolak ukur keberhasilan itu biasa di dapat dari hasil panen itu produksi permusim yaa tapi terkadang juga kalau tanam kan biasa cuaca tidak mendukung. Kalau masalah berhasilnya itu adalah sedikit-sedikit dibandingkan yang ditanam sebelumnya. Pasti ada peningkatan. (Hasil Wawancara MT 21 Januari 2019).

Kemudian pendapat Penyuluh Desa Galesong yang mengatakan bahwa :

“pokoknya dari tahun-tahun ini bervariasi setiap tahun, misalnya harga dipasaran bisa meningkat dan bisa menurun tapi tergantung cuaca” (Hasil Wawancara HF 21 Januari 2019).

Dari hasil wawancara diatas dengan beberapa informan menunjukkan bahwa keberhasilan pada program swasembada jagung dilihat dari pada saat menanam dan hasil panen produksi permusimnya dan setiap tahunnya produksi keberhasilan jagung bervariasi dan tergantung pada cuaca pada saat menanam.

Dari hasil wawancara diatas di beberapa informan dapat disimpulkan bahwa pada keberhasilan program Swasembada jagung di Kabupaten Takalar tersebut tidak hanya dilihat dari segi pada saat hasil produksinya saja, akan tetapi pada juga apabila kebutuhan ternak sudah terpenuhi, juga seperti masyarakat sudah tidak kekurangan lahan ternak yang bahan bakunya jagung. Keberhasilan program tersebut tidak hanya diukur dari sejauh mana bantuan yang masuk ke masyarakat, tetapi bisa juga dilihat dari sejauh mana tingkat produksi jika dibandingkan setiap tahunnya. Dan di tiap tahunnya adanya peningkatan sedikit demi sedikit tidak langsung banyak karena disebabkan cuaca.

- c. bagian ketiga yang merujuk pada efektifitas berfokus ke peningkatan program Swasembada jagung tersebut terlihat bahwa adanya peningkatan baik pada produksi maupun lahan ternak meskipun belum signifikan akan tetapi sudah ada perubahan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Seperti yang dikemukakan oleh Kabid tanaman pangan dan Horticultural yang mengatakan bahwa :

“peningkatan mungkin bisa dilihat dari terpenuhinya kebutuhan ternak kita lihat di takalar sudah tidak kekurangan lagi pakan ternak yang bahan bakunya jagung... walaupun tidak terlalu signifikan tapi yang jelas adalah peningkatan produksi itupun juga tergantung dari faktor yang ada disitu, kalau faktor alam kan tidak bisa dihindari tapi kalau secara normal berjalan kita ikuti prosedurnya itu bisa naik” (Hasil Wawancara LJ 28 januari 2019).

Hal diatas didukung oleh pendapat Kepala seksi produksi bidang TPH yang mengatakan bahwa :

“peningkatannya itu sebenarnya tergantung varietas ji dan bervariasi dari tahun ke tahun” (Hasil Wawancara EW 28 januari 2019).

Dari hasil wawancara diatas informan NH dengan EW menunjukkan bahwa peningkatan pada program swasembada jagung tersebut memang ada baik dari segi produksi sampai pada penghasilan masyarakat akan tetapi bervariasi di tiap tahunnya.

Hal diatas kemudian senada dengan pendapat Staf Produksi yang mengatakan bahwa :

“pokoknya selama ini program jalan kalau adaji benih adaji lahan adaji itu alhamdulillah rata-rata semua masyarakat yang penghasilannya meningkat” (hasil Wawancara MA 28 januari 2019).

Kemudian pendapat penyuluh desa bentang yang mengatakan bahwa :

“kalau peningkatannya yah belum terlalu ini paling dari 4 ton ke 9 ton tergantung juga dengan cuaca. (hasil Wawancara MNN 21 januari 2019).

Kemudian pendapat diatas senada dengan pendapat Penyuluh Desa Galesong yang mengatakan bahwa :

“yah peningkatannya itu baru sedikit –sedikit tidak bisa langsung itu naik, misalkan produksi tahun lalu itu bera ton ji naiknya kah cuaca tidak menentu” (Hasil Wawancara HF 21 januari 2019).

Dari hasil wawancara diatas dengan beberapa informan menunjukkan bahwa adanya peningkatan pada program tersebut dilihat dari terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan tetapi peningkatannya belum seberapa diakibatkan cuaca yang kurang mendukung.

Dari hasil wawancara diatas dibeberapa informan dapat disimpulkan bahwa peningkatan pada program sudah ada dari segi penghasilan masyarakat dan juga pada hasil produksi pada saat panen, akan tetapi peningkatan tersebut belum signifikan dan tidak seberapa disebabkan cuaca yang tidak mendukung.

3. Responsivitas kinerja pemerintah

Responsivitas kinerja pemerintah adalah kemampuan pemerintah dalam mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, mneyusun prioritas kebutuhan dan mengembangkannya dalam berbagai program pelayanan. Responsivitas mengukur daya tanggap organisasi terhadap harapan, keinginan dan aspirasi serta tuntutan warga pengguna layanan, responsivitas kinerja pemerintah juga berupa sebuah tanggapan dan kerelaan penyedia layanan dalam membantu memberikan pertolongan kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan .birokrasi dalam mendekatkan layanan terhadap masyarakat perlu upaya untuk mengenali apa saja kebutuhan masyarakat, kemudian pengenalan kebutuhan masyarakat tersebut menjadi agenda penting bagi pemerintah untuk mengembangkan pemberian layanan, sehingga masyarakat dapat merasa puas.

- a. Responsivitas kinerja pemerintah yang berfokus ke pembagian kerja dalam program Swasembada Jagung di Kabupaten Takalar tersebut, sesuai dengan pendapat Sekretaris dinas Pertanian yang mengatakan bahwa:

“pada pembagian kerja dilapangan itu, ada yang namanya penyuluh di setiap desa yang membantu masyarakat memberikan atau mengarahkan masyarakat dalam pembuatan cpcl lalu kemudian diproses dan dirangkumoleh Dinas Pertanian untuk pemberian bantuan benih kepada masyarakat petani jagung.” (Hasil Wawancara IB 4 februari 2019).

Hal diatas didukung oleh pendapat Kabid Tanaman Pangan dan Holticultural yang mengatakan bahwa :

“selama ini kita masih yah masih kita kerjasama dengan ppl dilapangan kalau untuk tim disini mungkin yah belum ada disini , kita Cuma pake ditingkat kecamatan kan ada kordinator penyuluh dan ditingkat desa ada namanya PPL itu jinkita yang kerjasama dgn itu kita manfaatkan kita berdayakan, kalau kita dari BTH Kita hanya penyedia benihnya kita bisa usulkan apakah ditingkat prov atau pusat jadi kita disini masuk pada bantuan benih tapi tetap kita juga ada monitoring jadi dilapangan kan ada penyuluhnya” (Hasil Wawancara NH 28 januari 2019).

Dari hasil wawancara diatas informan IB dengan NH menunjukkan bahwa pembagian kerja pada pelaksanaan program swasembada jagung di Kabupaten Takalar tersebut adanya kerja sama antara penyuluh lapangan di setiap desa dengan Dinas Pertanian terkait dengan hal itu. Dan untuk pada Dinas sendiri belum ada tim khusus yang bergerak pada bidang tersebut, tetapi pada pihak dinas hanay sebatas penyediaan benih.

Kemudian pendapat lainnya terkait dengan pembagian kerja pada program tersebut yaitu Kabag. Seksi produksi bidang TPH yang mengatakan bahwa :

“kalau masalah pembagian kerja saya disini sebenarnya kita terlibat semua tapi bidang tanaman pangan yang paling bertanggung jawab dan ada juga penyuluh atau ppl dilapangan yang tugasnya mendampingi petani” (Hasil Wawancara EW 28 januari 2019).

Kemudian hal diatas senda dengan pendapat Staf Seksi Produksi yang mengatakan bahwa :

“adaji sebenarnya ada petugasnya yang tangani jagung , inimi bidang yang tangani jagung, ada seksi produksi yang tugasnya dilapangan kalau masalah pemasaran kalau saya diseksi perbenihan sebenarnya kita dilapangan kita itu sediakan benih” (Hasil Wawancara KI 28 januari 2019).

Dari hasil wawancara diatas informan EW dengan KI menunjukkan bahwa pembagian kerja pada prgorma tersebut pada dasarnya semuanya terlibat akan tetapi yang lebih bertanggung jawab akan hal itu adalah pada bidang tanaman pangan dan holticultural dan juga penyuluh yang ada disetiap desa.

Hal diatas senada dengan pendapat Staf Seksi Produksi yang mengatakan bahwa :

“yah itu termasuk penyuluh pengamat kalau pengamat itu orang provensi tapi diperbantukan untuk daerah termasuk orang dinas, kalau penyuluh itukan mendamping” (HasilWawancara MA 28 Januari 2019)

Hal diatas didukung oleh pendapat Penyuluh Desa Bentang yang mengatakan bahwa :

“macam di dinas itukan bagian administrasi terus penyuluh itu tugas pengawalan tehnologi” (Hasil Wawancara MNN 21 Januari 2019).

Dari hasil wawancara diatas informan MA dengan MNN menunjukkan bahwa pembagian kerja pada program tersebut selain dari penyuluh itu sendiri dan pihak dinas ada juga yang dari provinsi mengamati secara langsung.

Selain pendapat diatas, penyuluh Desa Galesong juga mengemukakan pendapatnya terkait dengan pembagian kerja pada program Swasembada jagung tersebut yang mengatakan bahwa :

“kalau tanaman pangan itu Cuma sediakan bibit dan kalau di lapangan kita itu penyuluh yang tanggung jawab semua masalah dilapangan kah kita langsung berhubungan sama petani”(Hasil Wawancara HF 21 Januari 2019).

Kemudian pendapat penyuluh Galesong-Selatan Desa Bontomarannu senada dengan hal diatas yang mengatakan bahwa :

“yaa kalau pembagian kerjanya itu kita disini yaa penyuluh kan ada namanya PPL kalau di dinas itu kan Cuma menyediakan benih saja karna kita yang secara langsung ke masyarakat. kalau dikecamatan itu namanya BPP (Hasil Wawancara HA 21 Januari 2019).

Dari hasil wawancara diatas informan HF dengan HA menunjukkan bahwa pembagian kerja dalam program Swasembada jagung tentunya ada dari pihak Dinas yaitu bidang Tanaman pangan akan tetapi hanya sebatas pemberian atau sebagai penyedia benih kemasyarakat. Dan untuk yang ada dilapangan adalah penyuluh itu sendiri yang secara langsung berinteraksi ke masyarakat.

Dari hasil wawancara diatas dibeberapa informan terkait dengan responsivitas kinerja pemerintah yang berfokus pada pembagian kerja dapat disimpulkan bahwa pada pembagian kerja pada program swasembada jagung terlihat belum ada tim secara langsung yang dari Dinas pertanian yang menangani lebih rinci. Pada bidang tanaman pangan dan horticultural disebutkan bahwa bidang tersebut yang menangani secara rinci akan tetapi, pada kenyataanya hanya sebatas pemberian atau penyediaan benih saja. Nyatanya hanya penyuluh disetiap desa lah yang berperan dan bertanggung jawab secara utuh didalam hal

pembagian kerja tersebut. hal inilah yang perlu diperhatikan oleh pemerintah terkait didalam pelaksanaan program tersebut yang tentunya diharapkan bisa memberi perhatian khusus atau adanya tim secara khusus dalam mengawal program swasembada jagung, mengingat bahwa harapan pemerintah terkait dalam hal ini Bupati Takalar yang mencangkan bahwa Takalar harus menjadi produksi utama Jagung.

- b. bagian 2 yang merujuk pada responsivitas kinerja pemerintah berfokus ke tugas dan fungsi yang terlobat didalamnya. Hal ini dikemukakan oleh pendapat Sekretaris Dinas Pertanian yang mengatakan bahwa :

“kita terdepan punya penyuluh dilapangan bersama kepala desa..... kalau bidang tanaman pangan itulah yang mengkordinir secara langsung jadi dinas pertanian itu secara tehnis itu diwakili oleh dinas tanaman pangan yang sudah dibagi ada seksi menangani benih dan produksinya” (Hasil Wawancara IB 4 februari 2019).

Hal diatas senada dengan pendapat Kabid Tanaman Pangan dan Holticultural yang mengatakan bahwa :

“kalau kita dari BTH Kita hanya penyedia benihnya kita bisa usulkan apakah ditingkat prov atau pusat jadi kita disini masuk pada bantuan benih tapi tetap kita juga ada monitoring jadi dilapangan kan ada penyuluhnya dan juga sebatas itu pembinaan dilapangan tehnik budidayanya seperti apa itukan salah satu yang mempengaruhi produksi. (Hasil Wawancara LJ 28 Januari 2019).

Dari hasil wawancara diatas informan IB dengan NH menunjukkan bahwa mereka mengedepankan penyuluh yang ada dilapangan dan di Dinas Pertanian itu sendiri yaitu bidang tanaman pangan dan holticultural, secara teknis mengkordinir langsung dalam menyediakan benih dan juga memonitoring.

Kemudian pendapat kepala seksi Perbenihan Bidang TPH yang mengatakan bahwa :

“yang jelas orang dilapangan itu mulai dari CPCL dia yang bertanggung jawab istilahnya betul-betul misalnya kelompok pertama harus terdaftar CPCLnya permintaannya seperti apa sampai penyaluran benihnya, tanamnya dan panennya dia sampai ke hasil harus tau” (Hasil Wawancara KW 28 Januari 2019).

Hal di atas didukung oleh pendapat Staf Seski Produksi yang mengatakan bahwa :

“yah mendampingi terus sosialisasi itu dilakukan oleh penyuluh dan kita ini menyediakan kebutuhan yg diperlukan dilapangan” (Hasil Wawancara KI 28 Januari 2019).

Dari hasil wawancara diatas informan KW dengan KI menunjukkan bahwa penyuluh dilapangan selain mendampingi masyarakat petani, juga bertanggung jawab penuh didalam hal bantuan pembuatan cpcl sampai kepada mensosialisasikan program Swasembada jagung tersebut.

Hal diatas didukung oleh pendapat Staf Seksi Produksi yang mengatakan bahwa :

“kalau dilapangan itumi tadi mendampingi petani dalam penyediaan lahan, menyusun CPCL, terus kalau ada masalah hama langsung ditangani oleh pengamat dicarikan solusi bagaimana terus dicarikan juga bantuan” (Hasil Wawancara MA 28 Januari 2019).

Kemudian hal diatas senada dengan pendapat Penyuluh Desa Galesong yang mengatakan bahwa :

“melakukan kunjungan ke kelompok, kelapangan atau bisa perorangan juga tapi kalau banyak orang yah baguski lagi tapi tidak menentu kadang ke lapangan atau ke kelompok” (Hasil Wawancara HF 21 Januari 2019).

Dari hasil wawancara diatas informan MA dengan HF menunjukkan bahwa pada tugas dan fungsi yang terlibat dalam program tersebut seperti pada penyuluh yaitu melakukan kunjungan kemsayarakat, mendampingi dalam

menyediakan lahan, kemudian membantu masyarakat menyusun CPCL dan apabila terdapat masalah dialapangan, pengamat secara langsung yang menangani memberikan solusi dalam masalah tersebut.

Dari hasil wawancara diatas dibeberapa informan dapat disimpulkan bahwa pada responsivitas kinerja pemerintah yang berfokus pada tugas dan fungsi orang yang terlibat dalam pelaksanaan program swasembada jagung di Kabupaten Takalar adanya tugas dan fungsi disetiap orang yang terlibat telah menjalankan tugas mereka baik pada pengamat lapangan itu sendiri maupun penyuluh lapangan yang secara langsung berinteraksi kemasyarakat dan bertanggung jawab penuh terhadap petani jagung dalam hal pengsosialisasian dan bahkan pada pendapmingan pembuatan cpcl dalam hal pengajuan bantuan. hal itu sudah dijalankan di setiap yang terlibat didalam program tersebut. adapun pada Dinas Pertanian itu sendiri yang juga tidak terlepas dari tugas memonitoring akan tetapi pada hakikatnya belum ada secara khusus yang membindangi program tersebut dan hanya sebatas pemberian bantuan benih saja.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan tentang pengembangan kapasitas birokrasi level bawah pada program swasembada jagung di Kabupaten Takalar yang terdapat beberapa indikator maka disimpulkan bahwa :

1. Indikator Efisiensi yang mempunyai titik fokus pada ketepatan waktu dalam pelayanan dan pemanfaatan sumber daya yang ada. Dimulai pada ketepatan waktu prosedur pelaksanaan program terlihat bahwa prosesnya masih berbelit-belit dan belum terlihat efisiensi dalam pelaksanaan program tersebut walaupun memang sudah terarah secara teknis, akan tetapi pada birokrasi level bawah masih ada juga yang tidak memahami alur proses perencanaan pada program tersebut. Kemudian pada pemanfaatan sumber daya itu sudah terlihat semua pihak yang terkait itu bekerja sesuai dengan tugas masing-masing, dimana tugas dilapangan dalam hal ini adalah tanggung jawab dari penyuluh dan PPL yang mengontrol jalannya program swasembada jagung sementara itu dinas bertugas untuk menjadi pelaksana teknis yang menjadi penyedia dari kebutuhan program swasembada ini baik berupa bibit, alsintan dan kebutuhan pertanian lainnya.
2. Indikator Efektifitas . Hal ini mempunyai fokus yaitu keberhasilan pencapaian tujuan, keberhasilan pada program dan peningkatan pada

program. Terlihat bahwa pada indikator ini Dinas Pertanian dan juga petugas lapangan mengharapkan adanya peningkatan pada produksi jagung dan menginginkan Takalar sebagai produksi utama jagung yang bisa diekspor, meskipun adanya peningkatan keberhasilan pada program tersebut tetapi masih belum signifikan karena selain dari kurangnya lahan ternak untuk masyarakat juga dipengaruhi oleh cuaca yang terjadi pada saat proses berlangsung. Hal ini yang perlu lebih diperhatikan pemerintah untuk lebih memperbanyak lahan ternak dan pemasukan benih agar harapan yang diinginkan bisa tercapai dan pendapatan kelompok petani jagung pun bisa meningkat.

3. Indikator Responsivitas kinerja pemerintah. Hal ini mempunyai dua titik fokus yaitu pembagian kerja, tugas dan fungsi. Pada pembagian kerja dalam program swasembada jagung tersebut, tentunya Dinas Pertanian Kabupaten Takalar yang secara langsung mengadopsi program tersebut yang secara teknis di ambil alih oleh bidang tanaman pangan dan horticultural yang juga memonitoring selain itu ada juga petugas lapangan yang disebut dengan penyuluh lapangan yang mendampingi secara langsung dan juga sebagai penanggung jawab secara utuh kelompok masyarakat petani jagung baik dari segi bantuan pembuatan cpcl yang dilakukan pada saat ingin meminta benih. Dan tugas penyuluh inilah selain untuk sosialisai juga penyuluh berkordinasi langsung pada dinas pertanian. Setelah itu tugas pihak Dinas Pertanian yang menyampaikan keinginan masyarakat pada tingkat provinsi dan bahkan Pemerintah Daerah itu

sendiri. Akan tetapi hal yang masih kurang adalah belum ada tim tersendiri terkait dari Dinas Pertanian yang secara langsung bertanggung jawab penuh pada program tersebut. terlihat memang bahwa pada bidang TPH yang mengurus secara teknis tetapi hanya sebatas memberikan bantuan benih ke kelompok tani. Olehnya itu dapat dikatakan bahwa pengembangan kapasitas birokrasi level bawah pada program swasembada jagung di Kabupaten Takalar, masih perlu adanya pemerhatian khusus, dan pemahaman secara mendalam.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis menyimpulkan saran sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada pemerintah agar mampu memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat berupa pelayanan yang mudah untuk di akses oleh masyarakat itu sendiri.
2. Pemerintah harus lebih meningkatkan pengembangan kapasitas birokrasi level bawah pada dinas pertanian dalam rangka pencapaian tujuan program swasembada pangan
3. Meningkatkan kualitas kinerja para aparatur yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat serta pencapaian profesionalitas kerja para aparatur
4. Mampu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang program pemerintah khususnya di idang tanaman pangan sehingga target

produksi kabupaten mampu untuk di capai dan terpenuhinya kebutuhan pangan nasional.



DAFTAR PUSTAKA

- Albar, Yusdi. 2015. *Harga Jagung Tinggi, Petani Desa Tonasa, Takalar Panen Jagung BISI-18*. Artikel jagungbisi terbit pada 20 August 2015 pada <http://jagungbisi.com/harga-jagung-tinggi-petani-desa-tonasa-takalar-panen-jagung-bisi-18/> (diakses pada 20 nove,ber 2017)
- Anggraeni, Kiki. 2015. *Pengembangan Kapasitas Pegawai Untuk Mewujudkan Good Governance (studi pada badan kepegawaian daerah kabupaten malang)*. Jurnal administrasi publik (JAP) vol. 3 No. 7
- Arthur. 2017. *Produksi Terus Naik, Swasembada Jagung Bisa Terwujud Akhir 2017*. Artikel liputan 6 pada <http://bisnis.liputan6.com/read/3021613/produksi-terus-naik-swasembada-jagung-bisa-terwujud-akhir-2017> (diakses pada 5 november 2017).
- Bagus, Denny. 2010. *Penilaian Kinerja Karyawan: Definisi, Tujuan dan Manfaat*. Jurnal sdm pada <http://jurnal-sdm.blogspot.co.id/2009/04/penilaian-kinerja-karyawan-definisi.html> (12 desember 2017)
- Dwitananda, R, Nindicha. 2012. *Street-Level Bureaucracy: The Critical Role Of StreetLevelBureaucrats*. <http://blog.ub.ac.id/thatsdicha/2012/03/07/street-level-bureaucracy-the-critical-role-of-street-level-bureaucrats-michael-lipsky/> (diakses pada tanggal 17 oktober 2017).
- Erasmus, Ermin. 2017. *Street Level Bureaucracy*. Guidance note 5 july 2017 dari http://www.Hpsafrica.org/images/street_level_bureaucracy_final_for_web.pdf, 2017 (diakses pada tanggal 20 oktober 2017)
- Ginting, Yosep. 2012. *Pengembangan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah di Era Otonomi (Studi Kasus : Pemerintah Daerah Kabupaten Samosir)*.
- Gemala, Rizki. 2016. *Dampak Program Upaya Khusus (Upsus) Padi Jagung Kedelai (Pajale) pada Komoditas Padi Terhadap Perekonomian Kabupaten Tanjung Jabung Timur*. Jurnal Media Agribisnis (MeA) Vol.1 No.1 Tahun 2016
- Hupe, Peter & Hill, Michael. 2007. *Street Level Bureaucracy and Public Accountability*. Public administration vol. 85, no. 2
- Kasmad, R & Alwi. 2014. *Analysis Of Local Government Capacity Network In Empoweringstreet Wendors Policy Implementation In Makassar City*,

Indonesian. European journal of research in social science vol. 2 no. 2 progressive academic publishing, uk www.idpublications.org

Kurniawan. 2008. *Street Level Birokrasi Dan Idealitas Pelayanan Publik*. Jurnal administratio vol 2, no 4 (2008) terbit 24 Jul 2013 pada <http://id.portalgaruda.org/?ref=browse&mod=viewarticle&article=258223> (diakses pada 3 januari 2018).

Kementrian Agraria dan tata ruang/badan pertanahan nasional. 2018. *Peraturan Presiden Republik Indoensia Nomor 17 Tahun 2015” Web Kementrian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional*. <http://www.bpn.go.id/PUBLIKASI/Peraturan-Perundangan/Peraturan-Presiden/peraturan-presiden-republik-indonesia-nomor-17-tahun-2015-56987> (diakses pada 11 november 2017)

Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 2014. *Peraturan Menteri Kementrian Pertanian Nomor 11/Permentan/Ot.140/3/2015 Tahun 2015*. Web kementrian hukum dan hak asasi manusia pada <http://peraturan.go.id/permen/kementan-nomor-11-permentan-ot.140-3-2015-tahun-2015.html> (diakses pada 12 november 2017)

Lexy, Moleong. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT.Remaja Rusdakarya

Lipsky, Michael. 2010. *Street Level Bureaucracy : Dilemmas Of The Individu In Public Services*. The russel suge foundation. New york.

Milen, Anneli. 2006. *Capacity Building Meningkatkan Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: pembaharuan.

Nathaniel, Gervin. 2017. *Sulsel Berkontribusi Besar Terhadap Swasembada Pangan*. Artikel metrotvnews terbit Selasa, 14 Nov 2017 20:00 WIB pada <http://news.metrotvnews.com/read/2017/11/14/787970/sulsel-berkontribusi-besar-terhadap-swasembada-pangan> (diakses pada 15 november 2017)

Nugroho, Setyo. 2014. *Pengembangan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Dalam Upaya Mewujudkangood Governance (Studi Pada Balai Besar Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Di Desa Malang)*. Fakultas ilmu administrasi. Universitas brawijaya. Malang.

Pratama, Sukma. 2017. *Indonesia Targetkan Swasembada Jagung Pada 2018*. artikel jitunews terbit 22 Januari 2017 pada <http://www.jitunews.com/read/51749/indonesia-targetkan-swasembada-jagung-pada-2018> (diakses pada 2 februari 2018).

- Putra, Erlanda Juliansyah. 2017. *Pengelolaan Kepegawaian Pada Era Otonomi Daerah*. Terbit pada 2 mei 2017 pada <https://www.scribd.com/doc/259241688/PENGELOLAAN-KEPEGAWAIAN> (diakses pada 12 desember 2017).
- Ratnasari, dkk. 2013. *Pengembangan Kapasitas (Capacity Building) Kelembagaan Pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Jombang*. Jurnal Administrasi Publik (JAP). Vol.1, No.3
- Rynmulia. 2011. *Street Level Birokrasi*. Artikel philosopheryn pada <http://philosopheryn.blogspot.co.id/2011/06/street-level-birokrasi.html> (diakses pada 25 oktober 2017).
- Saputro, Aji. 2015. *Hadapi Swasembada Jagung, Ini Strategi Kementan*. Artikel jitunews terbit 4 Mei 2015 11:50 WIB pada <http://www.jitunews.com/read/13356/hadapi-swasembada-jagung-ini-strategi-kementan> (diakses pada 15 februari 2018).
- Shadrina, Adilah. 2013. *Pentingnya Peran Visi Dan Misi*. Artikel adilah terbit selasa 8 april 2013 pada <http://dilahshadrina.blogspot.co.id/2013/04/pentingnya-peran-visi-dan-misi.html> (diakses pada 20 februari 2018).
- Sholah. 2014. *Pengertian dan Pentingnya Manajemen*. Artikel caragampang terbit 23 agustus 2014 pada <http://www.caragampang.com/2014/08/pengertian-dan-pentingnya-manajemen/> (diakses pada 15 februari 2018)
- Zakaria, Amar. 2011. *Kebijakan Antisipatif Dan Strategi Penggalangan Petani Menuju Swasembada Jagung Nasional*. Analisis kebijakan pertanian. Vol. 9 No. 3.



DOKUMENTASI WAWANCARA

1. Wawancara dengan sekretaris dinas pertanian Kabupaten Takalar



2. Wawancara dengan kepala bidang tanaman pangan dan hortikultura



3. Wawancara dengan kepala seksi produksi bidang tanaman pangan dan hortikultura



4. Wawancara dengan kepala seksi perbenihan bidang tanaman pangan dan hortikultura



5. Wawancara dengan pegawai dinas pertanian



6. Wawancara dengan pegawai dinas pertanian



7. Wawancara dengan penyuluh



OLAH DATA HASIL WAWANCARA

1. EFISIENSI

NO	INFORMAN	INDIKATOR
1.	Sekertaris Dinas pertanian	<ul style="list-style-type: none"> • eh jadi kalau tahapan perencanaannya dimulai dari dasar berapa kebutuhan nasional kemudian kita konversi ke lahan berapa ketersediaan lahan , setelah kita konversi seperti itu karna bupati canamkan takalar sebagai kabupaten jagung maka dari target 8 rh hektar biasanya kita pacu menjadi 20 rb hektar • prosedurnya itu cukup panjang juga tapi kalau secara tehnik itu ditangani oleh bidang tanaman pangan, kemudian bidang tanaman pangan sampaikan ke kordinator penyuluh di setiap kecamatan nanti itu dicamatan dibagi berdasarkan potensi lahan masing-masing rkpp jadi setelah itu penyuluh membuat cpcl bersama petani lalu distor ketanaman pangan terus diverifikasi oleh tanaman pangan lalu di lanjutkan ke provensi dan pusat untuk ketersediaan benih , khusus ut pihak unismuh sama menyeter cpcl lalu ke pimpinan muhammadiyah takalar terus ke SPI nanti spi teliti cpclnya nanti pemasarannya langsung ke unismuh tapi kalau dari tanaman pangan itu langsung ke masyarakat • pelaksanaannya itu setiap tahun bulan november itu pemutahiran cpcl untuk musim

2.	Kepala bidang tanaman pangan dan horticultural	<p>tanam november desember kalau jagung, kemudian di febuari, april dan agustus</p> <ul style="list-style-type: none"> • jadi yang awasi dilapangan ini adalah penyuluh, jadi kita dikabupaten ini kordinasi dengan programnya tapi pelaksana langsungnya itu dilapangan ut awasi itu penyuluh • eh ini termasuk ada bantuan benih jagung yang masuk di petani , kita bantu petani dengan benih jagung • inikan kelompok petani sebagai pelaksana kegiatan dilapangan terus di persawahan kan ada namanya BPP(balai penyuluh pertanian) itu di tingkat kecamatan, saya”kalau untuk bidang ta sendiri bagaimana?” lanjut Hj.laju kalau disini tanaman pangan kordinasinya yah mungkin sampai di tingkat provinsi dan penda pasti dilibatkan disini • untuk ditingkat lapangan barangkali kan yang menjadi pelaksana itu adalah kelompok tani, jadi yang mungkin berperan juga disini adalah PPL memberikan penyuluhan kepada kelompok tani terus pendataan lahan pertanian itu dilakukan oleh PPL dan semua petugas pertanian • yah pengawasannya kita kan disini kebetulan kita libatkan juga itu babinsa dilibatkan dipajale jadi ditingkat lapangan itu ditingkat desa ada babinsa dan ppl,saya” bagaimana itu tugasnya babinsa ?” lanjut Hj.layu jadi babinsa itu kerja sama saja dengan PPL , saya” kalau sistem pengawasannya dia bagaimana ?” lanjut Hj.layu jadi yah dia memantau dan laporannya juga jadi babinsa dan PPL itu ada laporannya jadi dia harus sinkron laporannya jadi dibawa itu ppl dan babinda bermitra sama-sama membina kelompok terus pelaporannya dia harus sinkron jadi babinsa melapor di kodim dan ppl melapor di dinas, jadi termasuk itu pelaksanaan kegiatan
----	--	---

3.	Kepala seksi produksi bidang TPH	<p>pertanaman kan disitu harus ada data yang dia ambil jadi minimal dia tau pertanaman di desa ini sekian berapa hektar</p> <ul style="list-style-type: none"> • sebenarnya kalau tahapan perencanaan ini sudah bukanmi kita lagi kan dari APBN toh istilahnya pusat punya jadi pada prinsipnya kalau mereka kasi kita ini sisa menjalankan karna kita terima barang saja • kalau kita disini prinsipnya hanya penerima jadi kita itu kabupaten hanya menyiapkan CPCL • eh begituji kan kita sudah siapkan CPCLnya terus kita bikinkan SK , jadi kita hanya sosialisasi dulu di kelompok melalui PPL atau kita langsung dari dinas sudah itu mereka sudah bikinkan CPCLnya nanti itu dimasukkan di BPP lalu di rekap terus dimasukkan di bidang dan bidang yang Skkan diTTD oleh kadis lalu di serahkan ke provensi dan disitu dinas provensi kasi kita barang • sama PPL dan kita dari dinas tapi tidak ada ketentuan berapa kali, yang jelas pendampingan PPL itu otomatis dilapangan dan kalau kita dari dinas tergantung dari pejabatnya
4.	Kepala seksi perbenihan	<ul style="list-style-type: none"> • program ini direncanakan pusat dan provensi karna kan ini program pusat • yah dari dinas langsungji ke desa atau kelompok tani • yah dimulai dari pengusulah bibit atau permintaan bibit oleh petani • yah itumi ada kayak super visior dilapangan itumi yang awasi
5.	khalid h idris (staf seksi produksi)	<ul style="list-style-type: none"> • sebenarnya program ini sudah dicanamkan lama tapi mungkin belum terekspos dan dibuat kayak biasaji toh karna kan skrng kita canamkan kabupaten jagung jadi mungkin baru terekspos • yah melalui sekolah lapang, pelatihan petani

6.	Muh Arham (staf seksi produksi)	<p>biasanya kita undang atau datangkan pemateri dari dinas kadang dilapangan kita undang juga dinas provensi dalam memberikan pelatihan</p> <ul style="list-style-type: none"> • dia pelaksanaannya itu tadi kayak pelatihan terus dilapangan disosialisasikan ke petani toh biar tidak bosan petani harus di variasi • ini kan ada dari PPL dan dari kodim kan ini istilahnya upsus jadi itu awasi babinsa awasi disana sempat ada permainan di lapangan • susah juga kayaknya ini, itumi tadi ku bilang bulan oktober itu ada penanaman kemudian bulan april mei juga da itukan panen 1x ji agustus juga ada • paling kalau ada bantuan lewat bantuan kelompok toh • pertama itu penyediaan lahan, kemudian pengolahan kan ada juga yang tidak ada pengolahannya langsung tugal saja seperti di pegunungan itukan tidak ada dia langsung di tuang, kalau sawah itu pakai pengolahan biasanya apalagi bulan oktober bisa tanam langsung, <i>saya</i>”berati curah hujan juha berpengaruh pak ?” lanjut arham iya sangat berpengaruh itu tapi skrng itu diluncurkan lagi alat pengering. • kalau pengawasan itukan selain ada petugas yang mendampingi kan ada penyuluh dan ada dari pengamat hama jadikalau terkait dengan hama ada pengamatnya <i>saya</i>”Bagaimana itu sistem pengawasannya? Lanjut arham pengamat itu begitu ada gejala serangan hama itu dia turun langsung terus ada penangkar itu ada pengawarnya tersendiri itu namanya BPSB itu mengawasi penjualan mulai dari bibitnya, lokasinya hrus di daftar samapai panennya .
7.	Muh Nurdin nasution (penyuluh desa bentang)	<ul style="list-style-type: none"> • kan ini pertama petani yang mau menanam jadi yang pertama dulu penyediaan lahan dulu

8.	Mustar (penyuluh desa kale bentang)	<p>berapa luas, berapa target kebutuhan benih dan berapa target produksi</p> <ul style="list-style-type: none"> • jadi dari provinsi ke daerah terus daerah langsung masing-masing ke kelompok tani yang menangani • jadi yah kelompok tani dan anggotanya membuat cpcl • jadi yang diawasi itu adalah penyaluran benihnya, terus pengawasan luas tanam dan yang mengawas itu kita-kita ini karna tugasta mengawal • perencanaanya itu biasa 2x dalam setahun jadi biasa itu ada setelah tanam padi dan juga ada setelah tanam kedelai • dari pusat ke provinsi terus provinsi ke daerah dan ke petani • biasanya itu penyaluran bibit dulu baru pengecekan luas tanam
9.	Harafi (penyuluh desa galesong)	<ul style="list-style-type: none"> • jadi ada dari dinas kabupaten, penyuluh dan kepala desa • kalau perencanaanya itu haruski sama toh haruski 1 jalanji tidak bisa beda kan satu tujuanji • mulai dari pusat kan masuk melalui anggaran APBN terus diarahkan ke provinsi baru ke kabupaten dan kabupaten melalui cpcl ke petani • pelaksanaanya anjo haruski petani dulu buat cpcl dipandu oleh PPL terus ke kecamatan dan kecamatan ke kabupaten dan ke provinsi tapi petani itu laksanakan ki semua dilapangan kah dia yang tanam • mengontrol pembagian benih kan dlu bekerja sama sama kodim tapi skrng pisah maki sekrang
10.	Samsiah Arif (penyuluh galesong-selatan desa bontomarannu)	<ul style="list-style-type: none"> • kan itu dimulai dari CPCL karena berjenjang itu sampai di provinsi • begitu artinya kan awalnya kita itu dari petani melalui cpcl baru minta bantuan ke dinas

		<ul style="list-style-type: none"> • ini sudah waktu masih di 2018 kita sudah genjot kabupaten jagung • penyuluh dan babinsa itu yang awasi kalau di desa
--	--	---

2. EFEKTIFITAS

NO	INFORMAN	INDIKATOR
1.	Sekretaris Dinas pertanian	<ul style="list-style-type: none"> • nah tentunya kita yang pertama mencapai target yang kita canamkan kemudian dengan tercapainya target kita harapkan peningkatan pendapatan masyarakat petani sehingga kesejahteraannya bisa meningkat dari menanam jagung. • kalau saya sebagai pribadi setiap saat melalui ceramah itu mengharapkan seluruh petani yang tdk berigasi tehnis itu bisa tanam jagung karna jagung sangat rendah resiko pertanamannya sehingga potensi keberhasilannya sangat tinggi . • yang pertama itu lahan ditanami jagung, ke dua tentu produksinya meningkat dari 5 ton mendekati 10 ton. • jadi kalau dari varitas nasional itu dari 5 ton menjadi 7 toh tapi kalau dari varietas high class itu yang mahal seperti pioner itu dari 7 ton ke 10 toh, saya “ tapi khusus takalar selama jalannya ini proram bagaimana dia peningkatannya pak ?” lanjut sekdis jadi cenderung yang menanam high class itu otomatis pendapatannya itu meningkat karna itu 1 kg itu rata-rata perbedaannya 500 kg kali 3 rb jadi yah 1,5 juta perhektar jadi yah lumayanlah
2.	Kepala bidang tanaman pangan dan horticultural	<ul style="list-style-type: none"> • harapannya yah semoga program itu tercapai dan adan peningkatan pendapatan petani yang

3.	Kepala seksi produksi bidang TPH	<p>mengarah kepada peningkatan kesejahteraan petani kan itu visi dari dinas pertanian jadi mudah-mudahan pembinaan ini ters dilakukan hingga tercapai peningkatan produksi yang mengarah kepada peningkatan pendapatan petani dan akhirnya bisa tercapai yang namanya kesejahteraan petani</p> <ul style="list-style-type: none"> • yah mungkin bolehlah untuk kelompok atau petugas lapangan yang berprestasi itukan untuk memotivasi bisa seperti itu, saya”kalau selama ini sudah ada tidak penghargaan yang diterima?” iya ada baru-baru ini kayaknya yang terima penghargaan tapi tidak tau apakah dari jaagung atau apa yang jelas ada baru-baru ini PPL dengan kelompok makanya kita juga disini dari jagung bisa mendapatkan itu • mungkin bisa dilihat dari terpenuhinya kebutuhan ternak, jadi mungkin bisa dilihat dari mungkin kita di takalar sudah tidak kekurangan lagi pakan ternak yang bahan bakunya jagung yah mungkin salah satu indikator keberhasilan bisa dilihat disitu • yah adalah peningkatan walaupun tidak terlalu signifikan tapi yang jelas adalah peningkatan produksi, saya” sekitar berapa persen itu ibu peningkatannya?” lanjut Hj.layu yah bisa di ukur dari produksinya yah bisa 10-20 persenlah peningkatan produksinya , itupun juga tergantung dari faktor yang ada disitu, kalau faktor alam kan tidak bisa dihindari tapi kalau secara normal berjalan kita ikuti prosedurnya itu bisa naik • yang pastinya peningkatan produksiyang akan menghasilkan peningkatan pendapatan petani ut kesejahteraanya • kalau saya secara pribadi sebenarnya tidak ada , istilahnya yah kita merasa senang saja kalau petaninya berhasil • kita kan dari tahun ketahun diliat dari berapa
----	----------------------------------	--

		<p>persen peningkatannya</p> <ul style="list-style-type: none"> • yang pertama kalau misalkan yang turun bibitnya adalah varietas A kita liat saja dulu pertama pertumbuhannya setelah itu bagaimana produksinya nanti, kalau produksi kan itu yang jadi tolak ukurnya nanti di akhir, peningkatannya itu sebenarnya tergantung vrietas ji dan bervariasi dari tahun ke tahun • yah ituji peningkatan produksi , ituji yang pertama • yah kalau kita didinas ituji juga yang diharapkan kah kalau naikmi juga itu produktifitasnya disebut-sebut maki juga • ituji barangkali peningkatan produksi • yah naikji juha tapi tidak seberapa ji
5.	khalid h idris (staf seksi produksi)	<ul style="list-style-type: none"> • kan sebenarnya itulah kita sudah bangga bisa keluar kenalkan takalar penghasil jagung • iya kalau saya secara pribadi sebenarnya harus ada reward, karna jangan Cuma ekspor tapi tidak ada penghargaan dari pemerintah pusat • sebenarnya kalau tolak ukur keberhasilan ini diliat dari tidak perlu harus ada bantuan , jagung itu misalnya petani itu ada penangkarnya tidak perlu harus disuruh supaya istilahnya bisa mandiri • biasanya dia naik tapi belum seberapa paling tidak dia tidak turun stabil standar targetnya
6.	Muh Arham (staf seksi produksi)	<ul style="list-style-type: none"> • yah tentu kita minta produksi meningkat, kesejahteraan petani bertambah, kalau produksi meningkat yah pasti kesejahteraan juga ikut mneingkat • saya mauku di stabilkan masalah harga supaya harga juga bisa bagus kah petani juga semangat tanam jagung • yang pertama itu kita liat dari luas tanam kalau target luas tanam kita capai berarti berhasil, <i>saya</i>”berapa target luas tanam untuk

		<p>kabupaten takalar ?” lanjut arham kalau takalar itu 3x tanam rata-rata sekitar 2000 hektar 1x tanam kemudian hasil produksinya meningkat, <i>saya</i>” Berapa itu target produksinya?” lanjut arham sekarang yang dicapai itu belum seberapa</p> <ul style="list-style-type: none"> • pokoknya selama ini program jalan kalau adaji benih adaji lahan adaji alsintan rata-rata meningkat, <i>saya</i>”berapa persen kira-kira itu pak? Lanjut arham paling 1 atau 2 persen • yah itumi peningkatan produksi dan peningkatan pendapatan petani • mau liat bagaimana saja produksi naik itu saja kah tdk ada reward kita • yah itu berapa peningkatan produksi tarulah misal 2018 produksi sekian dan 2019 diharapkan meningkat atau bagaimanalah • kalau peningkatannya yah belum terlalu ini paling dari 4 ton ke 9 ton tergantung juga dengan cuaca.
7.	Muh Nurdin nasution (penyuluh desa bentang)	<ul style="list-style-type: none"> • harapan saya kira meningkatkan kesejahteraan petani • yah mungkin bukan sekedar reward tapi dari sisi agama itu nilai ibadah • tolak ukur keberhasilan itu biasa di dapat dari hasil panen itu produksi permusim • yahh untuk selama ini ada memang peningkatan tapi belum seberapa
8.	Mustar (penyuluh desa kale bentang)	<ul style="list-style-type: none"> • kita harapkan itu supaya petani bisa meningkat pendapatannya sejahtera toh • kalau kita itu ituji supaya pendapatan petani itu meningkat • pokoknya dari tahun-tahun ini berfariasi setiap tahun, misalnya harga dipasaran bisa meningkat dan bisa menentu tapi tergantung cuacaji
9.	Harafi (penyuluh desa galesong)	<ul style="list-style-type: none"> • kita harapkan itu supaya petani bisa meningkat pendapatannya sejahtera toh • kalau kita itu ituji supaya pendapatan petani itu meningkat • pokoknya dari tahun-tahun ini berfariasi setiap tahun, misalnya harga dipasaran bisa meningkat dan bisa menentu tapi tergantung cuacaji

10.	Samsiah Arif (penyuluh galesong-selatan desa bontomarannu)	<ul style="list-style-type: none"> • yah peningkatannya itu baru sedikit –sedikit tidak bisa langsung itu naik, misalkan produksi tahun lalu itu bera ton ji naiknya kah cuaca tidak menentu • kalau yang diharapkan yah ituji kesejahteraan petani melalui peningkatan produksi • yah senang jki juga kalau sejahtera petani • yah tergantung petaninya kalau bagus cara tanamnya yah berhasilki juga • tidak terllau pi juga tapi paling tidak meningkatji
-----	--	---

3. RESPONSIVITAS KINERJA PEMERINTAH

NO	INFORMAN	INDIKATOR
1.	Sekertaris Dinas pertanian	<ul style="list-style-type: none"> • jadi mulai dari lapanga kelompok tani berembut dengan anggotanya menyusun cpcl kemudian perencanaan tanam dibimbing oleh penyuluh, kemudian setelah ada cpclnya dinas kabupaten merangkum dan memproses lebih lanjut ut permintaan benih ke provensi dan pusat • kita terdepan punya penyuluh dilapangan bersama kepala desa, saya “kalau bidang tanaman pangan sendiri tugasnya seperti apa pak ?” lanjut sekdis kalau bidang tanaman pangan itulah yang mengkordinir secara langsung jadi dinas pertanian itu secara tehnis itu diwakili oleh dinas tanaman pangan yang sudah dibagi ada seksi menangani benih dan produksinya
2.	Kepala bidang tanaman pangan dan holticultural	<ul style="list-style-type: none"> • selama ini kita masih yah masih kita kerjasama dengan ppl dilapangan kalau untuk tim disini mungkin yah belum ada disini , kita Cuma pake ditingkat kecamatan kan ada kordinator penyuluh dan ditingkat desa ada namanya PPL itujinkita yang kerjasama dgn itu kita manfaatkan kita berdayakan, kalau kita

		<p>dari BTH Kita hanya penyedia benihnya kita bisa usulkan apakah ditingkat prov atau pusat jadi kita disini masuk pada bantuan benih tapi tetap kita juga ada monitoring jadi dilapangan kan ada penyuluhnya</p> <ul style="list-style-type: none"> • yah paling sebatas itu pembinaan dilapangan tehnik budidayanya seperti apa itu kan salah satu yang mempengaruhi produksi.
3.	Kepala seksi produksi bidang TPH	<ul style="list-style-type: none"> • kalau masalah pembagian kerja saya disini sebenarnya kita terlibat semua tapi bidang tanaman pangan yang paling bertanggung jawab dan ada juga penyuluh atau ppl dilapangan yang tugasnya mendampingi petani • yang jelas orang dilapangan itu mulai dari CPCL dia yang bertanggung jawab istilahnya betul-betul misalnya kelompok pertama harus terdaftar CPCLnya permintaannya seperti apa sampai penyaluran benihnya, tanamnya dan panennya dia sampai ke hasil harus tau
4.	Kepala seksi perbenihan	<ul style="list-style-type: none"> • yah kalau masalah produksi jagung itu seksi produksi uruski kalau seksi pembenihan paling itu sediakan benih • yah itu sosialisasi
5.	khalid h idris (staf seksi produksi)	<ul style="list-style-type: none"> • adaji sebenarnya ada petugasnya yang tangani jagung , inimi bidang yang tangani jagung, ada seksi produksi yang tugasnya dilapangan kalau masalah pemasaran kalau saya diseksi perbenihan sebenarnya kita dilapangan kita itu sediakan benih • yah mendampingi terus sosialisasi itu dilakukan oleh penyuluh dan kita ini menyediakan kebutuhan yg diperlukan dilapangan.
6.	Muh Arham (staf seksi	<ul style="list-style-type: none"> • yah itu tdi termasuk penyuluh pengamat kalau

	produksi)	<p>pengamat itu orang provinsi tapi diperbantukan untuk daerah termasuk orang dinas, kalau penyuluh itu mendampingi, kalau pengamat yah itu menangani masalah hama dan kalau orang dinas itu melaksanakan itu program misalnya upsus pajale itu lewat dinas dulu dibicarakan bagaimana ini program bisa jalan termasuk kalau ada bantuan dari pusat lewat dinas dulu baru dinas menyampaikan ke penyuluh dan penyuluh itu dampingi petani membuat CPCL</p> <ul style="list-style-type: none"> • kalau dilapangan itumi tadi mendampingi petani dalam penyediaan lahan, menyusun CPCL, terus kalau ada masalah hama langsung ditangani oleh pengamat dicarikan solusi bagaimana terus dicarikan juga bantuan
7.	Muh Nurdin nasution (penyuluh desa bentang)	<ul style="list-style-type: none"> • macam di dinas itu bagian administrasi terus penyuluh itu tugas pengawalan teknologi • yah itumi sosialisasi, pengawalan sekalian pengawasan
8.	Mustar (penyuluh desa kale bentang)	<ul style="list-style-type: none"> • kita selaku penyuluh tentunya harus mengawasi dan membimbing hal teknis kepada petani • menyampaikan informasi dari dinas ke petani
9.	Harafi (penyuluh desa galesong)	<ul style="list-style-type: none"> • kalau tanaman pangan itu Cuma sediakan bibit dan kalau di lapangan kita itu penyuluh yang tanggung jawab semua masalah dilapangan kah kita langsung berhubungan sama petani • melakukan kunjungan ke kelompok, kelapangan atau bisa perorangan juga tapi kalau banyak orang yah bagus lagi tapi tidak menentu kadang ke lapangan atau ke kelompok
10.	Samsiah Arif (penyuluh galesong-selatan desa bontomarannu)	<ul style="list-style-type: none"> • itukan ada PPL di desa terus penyuluh kita d kecamatan itumi BPP • mendampingi petani terus membuat cpcl

		dengan kelompok tani
--	--	----------------------

BIODATA PENELITI



Nurwahyudin, dilahirkan di Benteng pada hari Selasa tanggal 16 bulan April tahun 1996. Anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Muhlis dan Hasnah memiliki adik laki-laki bernama Nuriman. Peneliti menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri 76 Tarowang Kab Takalar dan lulus pada tahun 2008 kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri

1 Galesong-selatan Kab Takalar lulus pada tahun 2011 dan melanjutkan pendidikan ditahap selanjutnya di SMK Negeri 1 Galesong-Selatan Kab Takalar dengan jurusan Teknik Komputer dan Jaringan lulus pada tahun 2014. Pada tahun 2014 peneliti melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi, tepatnya di Universitas Muhammadiyah Makassar pada program studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Peneliti juga aktif dalam dunia organisasi intra kampus dengan terlibat secara aktif di Pimpinan Komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah periode 2016-2017 di bidang Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan bergabung menjadi salah seorang badan pengurus harian Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unismuh Makassar periode 2016-2017 di bidang Advokasi yang selanjutnya kembali bergabung menjadi salah seorang badan pengurus harian Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unismuh Makassar periode 2017-2018 di Organisasi

Dengan ketekunan hingga motivasi tinggi untuk terus belajar dan berusaha, peneliti telah berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir skripsi ini. Semoga dengan penelitian tugas akhir skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan khususnya dalam pengembangan disiplin Ilmu Administrasi Negara. Akhir kata peneliti mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikannya skripsi yang berjudul “Pengembangan Kapasitas Birokrasi Level Bawah Pada Kebijakan Swasembada Jagung Di Kabupaten Takalar.

